



BUPATI ENDE
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 41 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ENDE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

Paraf Koordinasi	
Kepala Satpol PP	
Kepala Bagian Hukum	

dengan

dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2025 – 2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende yang selanjutnya disebut Renstra Satuan Polisi Pamong Praja adalah rencana 5 (lima) tahunan yang menggambarkan analisis lingkungan strategis, faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan dan sasaran, strategi serta evaluasi kinerja.

Paraf Koordinasi	
Kepala Satpol PP	
Kepala Bagian Hukum	

2. Perencanaan ...

- 2. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
- 3. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam lingkup daerah dalam jangka waktu tertentu.
- 4. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
- 5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Ende untuk 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 - 2045.
- 6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Ende untuk 5 (lima) tahun terhitung mulai Tahun 2025 - 2029.
- 7. Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan Daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen perencanaan selama 1 (satu) tahun.
- 8. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan.
- 9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun.
- 10. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
- 11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran secara terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa.

Paraf Koordinasi	
Kepala Satpol PP	
Kepala Bagian Hukum	

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Visi adalah rumusan umum tentang keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan Tahun 2025.
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
15. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Renja Satuan Polisi Pamong Praja adalah dokumen perencanaan untuk 1 (satu) tahun.
16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan daerah.
17. Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan Daerah.
18. Daerah adalah Kabupaten Ende.
19. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.
20. Bupati adalah Bupati Ende.
21. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende.
22. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
23. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ende.
24. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Kepala Bappeda Kabupaten Ende.
25. Satuan adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende.
26. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende.
27. Sekretaris Satuan adalah Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende.

Paraf Koordinasi	
Kepala Satpol PP	
Kepala Bagian Hukum	

BAB II
PRINSIP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
- (2) Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.
- (3) Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Pasal 3

Perencanaan Pembangunan Daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Renstra Satuan disusun dengan maksud untuk mengarahkan seluruh dimensi kebijakan pembangunan pada bidang perencanaan baik sektoral maupun lintas sektor sebagai pedoman teknis strategis dalam penyelenggaraan pembangunan serta pelaksanaan pelayanan publik.
- (2) Tujuan penyusunan Renstra Satuan adalah:
 - a. sebagai dasar dalam Penyusunan Rencana Kerja Satuan setiap tahun;
 - b. sebagai pedoman dalam Penyusunan Anggaran Satuan yang kemudian dituangkan ke dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) disetiap bidang;
 - c. sebagai arahan kebijakan dan strategi pembangunan pada bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan di Daerah;
 - d. sebagai acuan pelaksanaan pembangunan dalam menentukan skala prioritas dalam pengelolaan dan pengembangan sumber daya sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan sehingga terjadi sinkronisasi perencanaan pembangunan secara menyeluruh;
 - e. sebagai informasi secara menyeluruh kepada segenap pelaku pembangunan bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan mengenai program-program strategis yang akan dikembangkan oleh Satuan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Paraf Koordinasi	
Kepala Satpol PP	
Kepala Bagian Hukum	

BAB IV

BAB IV
RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Pasal 5

- (1) Renstra Satuan Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran dan kebijakan serta program kegiatan Satuan yang berpedoman RPJMD Tahun 2025-2029.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. bab I Pendahuluan
 - b. bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan Dan Isu Strategis
 - c. bab III Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan
 - d. bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dan Kinerja
 - e. bab V Penutup.
- (3) Ketentuan mengenai isi dan uraian Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN

Pasal 6

- (1) Penyusunan Renstra Satuan melibatkan semua personil aparatur Satuan dan sektor terkait untuk membangun komitmen dalam pelaksanaan kegiatan Satuan selama 5 (lima) tahun.
- (2) Penyusunan Renstra Satuan didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan serta kondisi yang terjadi yang merupakan program prioritas.

Pasal 7

- (1) Rancangan Akhir Renstra Satuan disampaikan kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi.
- (2) Dokumen Rancangan Akhir Renstra hasil verifikasi Kepala Bappeda diajukan ke Bagian Hukum untuk proses penetapan menjadi Peraturan Bupati.
- (3) Kepala Satuan menyebarluaskan Peraturan Bupati tentang Renstra Satuan kepada semua Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator dan Pelaksana lingkup Satuan.

Paraf Koordinasi	
Kepala Satpol PP	
Kepala Bagian Hukum	

BAB VI

BAB VI
PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PERUBAHAN

Bagian Kesatu
Pengendalian

Pasal 8

- (1) Kepala Satuan melalui masing-masing Pejabat Pengawas dan Pejabat Administrator melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra Satuan.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
 - a. kebijakan perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. evaluasi.

Pasal 9

- (1) Pengendalian pelaksanaan Renstra Satuan meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan dan sasaran agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan bersama.
- (2) Pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh Pejabat Pengawas dan Pejabat Administrator lingkup Satuan meliputi realisasi kegiatan, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan kegiatan.
- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam bentuk laporan bulanan untuk disampaikan kepada Kepala Satuan mengetahui Sekretaris Satuan.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 10

- (1) Kepala Satuan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Satuan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap pelaksanaan program dan / atau kegiatan.

Pasal 11

- (1) Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan oleh masing-masing Bidang/Bagian dan dikoordinasikan dengan Sekretaris.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah, pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah, dan
 - b. menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi masing-masing bagian dalam rangka pencapaian Renstra Satuan.

Paraf Koordinasi	
Kepala Satpol PP	
Kepala Bagian Hukum	

Bagian

Bagian Ketiga
Perubahan
Pasal 12

- (1) Renstra Satuan dapat diubah dalam hal:
 - a. terjadi perubahan yang mendasar, atau
 - b. merugikan kepentingan lembaga dan/atau masyarakat.
- (2) Perubahan Rencana Strategis Satuan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13
Alokasi anggaran pada setiap program dan kegiatan yang termuat dalam Renstra Satuan masih bersifat pagu indikatif dan dapat berubah, bertambah atau berkurang tergantung pada kemampuan keuangan daerah setiap tahun anggaran.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2024 Tentang Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende Tahun 2025 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2024 Nomor 41), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 24 November 2025
BUPATI ENDE,
YOSEF BENEDIKTUS BADEODA

Diundangkan di Ende
pada tanggal 25 November 2025
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE

HIPARKUS HEPPI
BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2025 NOMOR 41

Paraf Koordinasi	
Kepala Satpol PP	
Kepala Bagian Hukum	

Paraf Hirarki	
Plt. Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
Kepala Satpol PP	

LAMPIRAN

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 41 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA KABUPATEN ENDE
TAHUN 2025-2029

ISI DAN URAIAN RENCANA STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TAHUN 2025-2029

	Hal
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Dasar Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	3
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	5
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	5
2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	5
A. Kedudukan dan Susunan Organisasi	5
B. Tugas dan Fungsi	6
C. Struktur Organisasi	11
2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	12
A. Sumber Daya Manusia	12
B. Sarana Prasarana	14
2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	16
2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan	19
A. Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan	19
B. Kerjasama Perangkat Daerah	20
2.2. Permasalahan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja	22
2.3. Isu-Isu Strategis	23
BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	26
3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	26
3.2. Strategi Dan Arah Kebijakan	28
3.2.1 Strategi	28
3.2.2 Arah Kebijakan	29
BAB IV. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	30
4.1 Uraian Program	30
4.2 Uraian Kegiatan	30

4.3	Uraian Sub Kegiatan	31
4.4	Uraian Sub Kegiatan Dalam Mendukung Program Pembangunan Daerah	53
4.5	Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)	65
4.6	Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	66
BAB V. PENUTUP		68
A. DAFTAR BAGAN		
B. DAFTAR TABEL		
C. DAFTAR LAMPIRAN		
Keputusan Bupati Ende Nomor 192/KEP/HK/2025 Tentang Pembentukan Tim Penyusun Dan Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende Tahun 2025 - 2029.		

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pasal 272 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah untuk tercapainya sasaran Pembangunan Nasional maka setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra PD) dengan berpedoman pada RPJMD.

Demikian halnya bagi Pemerintah Kabupaten Ende yang telah menetapkan dokumen perencanaan pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ende Tahun 2025–2029 dengan rumusan Visi **“Terwujudnya Kabupaten Ende Yang Maju, Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Berbasis Iman Dan Budaya Ende Lio Nage Sare Pawe “**.

Dalam menterjemahkan Visi Kabupaten Ende Tahun 2025–2029, Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) sebagai penyelenggaran Pemerintah Daerah yang mengembang tugas dan fungsi dalam perencanaan, penyusunan Rencana Strategis untuk perencanaan lima (5) tahunan yang sepenuhnya mengarah pada pencapaian misi dan program Kepala Daerah yang tertuang dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ende Tahun 2025–2029.

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende Tahun 2025–2029 secara substansi memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai, melalui strategi dan kebijakan yang dituangkan dalam program dan kegiatan dengan penyesuaian perkiraan dana yang bersifat indikatif. Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dilaksanakan melalui tahapan-tahapan antara lain: Persiapan Penyusunan, Perumusan Rancangan Awal Renstra, Penyusunan Rancangan Renstra, Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Daerah, Perumusan Rancangan Akhir, dan Penetapan Renstra Perangkat Daerah melalui Peraturan Kepala

Daerah menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ende Tahun 2025-2029;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Ende Tahun 2011-2031.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende.
18. Peraturan Bupati Ende Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ende.
19. Peraturan Bupati Ende Nomor 41 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende Tahun 2025-2029 ditetapkan dengan maksud memberikan arah dan pedoman yang jelas mengenai visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan lima tahunan dan diterjemahkan dalam pelaksanaan program/kegiatan organisasi.

b. Tujuan

Sebagai dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan organisasi, RENSTRA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende Tahun 2025-2029 mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Merupakan dokumen yang menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD);
2. Merupakan pedoman Kepala Perangkat Daerah guna mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah melalui perencanaan yang terukur, dan bersinergi dengan perencanaan provinsi dan nasional.

1.4. Sistematika Penulisan

RENSTRA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende Tahun 2025-2029 disusun dalam 8 Bab dengan sistematika penulisan, sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan :

1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah yang memuat Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan (Capaian SPM), Kelompok Sasaran Layanan, Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian layanan,
2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah yang menjelaskan Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan, Telaahan Visi, Misi, Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS RPJMD, dan Penentuan Isu-Isu Strategis terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib Satpol PP Kabupaten Ende.

BAB IV. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SATPOL PP, serta Hubungan Tujuan dan Sasaran Renstra dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD, Strategi yang ditentukan dalam mencapai Tujuan, Sasaran, serta Arah Kebijakan Organisasi dari Setiap Strategi Terpilih.

BAB VI. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat Program, Kegiatan, Sub Kegiatan beserta kinerja Indikator Target Kinerja dan pagu dana indikatif, Uraian Sub Kegiatan dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah, Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Target kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V. PENUTUP

Bab ini memberi gambaran tentang kesimpulan substansial, kaidah pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Eksistensi salah satu perangkat daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Ende yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang menyelenggarakan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yaitu Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende, sedangkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Satpol PP Kabupaten Ende dituangkan dalam Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ende.

Dijelaskan lebih lanjut kedudukan, susunan organisasi, tugas fungsi dan struktur organisasi SATPOL PP Kabupaten Ende sebagai berikut :

A. Kedudukan Dan Susunan Organisasi

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende merupakan unsur pelaksana Urusan Wajib yang menjadi kewenangan daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), menyelenggarakan Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat serta mitigasi dan penanggulangan bencana Kebakaran. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Ende.

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari:

1. Kepala Satuan
2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan
3. Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah, membawahi :
 - a. Seksi Pemeriksaan Pelanggaran Produk Hukum Daerah
 - b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Pelanggaran Produk Hukum Daerah
 - c. Sub Koordinator Substansi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan
4. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, membawahi:
 - a. Seksi Operasi
 - b. Seksi Pengendalian

- c. Sub Koordinator Substansi Kerjasama
- 5. Bidang Pengembangan Kapasitas dan Sumber Daya Aparatur, membawahi:
 - a. Seksi Pelatihan Dasar
 - b. Sub Koordinator Substansi Teknis Fungsional Sat Pol PP
 - c. Seksi Sumber Daya Aparatur Sat Pol PP
- 6. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahi :
 - a. Seksi Perlindungan Masyarakat
 - b. Sub Koordinator Substansi Bina Potensi Masyarakat
 - c. Seksi Pencegahan Mitigasi dan Pengerahan SDM
- 7. Bidang Pemadam Kebakaran, membawahi:
 - a. Seksi Pencegahan Kebakaran
 - b. Seksi Pemadam Kebakaran
 - c. Sub Koordinator Substansi Rehabilitasi

B. Tugas dan Fungsi

a. Tugas

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende bertugas membantu Kepala Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah, Menyelenggarakan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat serta mitigasi dan penanggulangan bencana Kebakaran.

b. Fungsi

1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah;
2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan atau Peraturan Kepala Daerah;
3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
5. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Daerah;
6. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat bersama POLRI, PPNS Daerah, dan atau aparatur lainnya;
7. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
8. Pelaksanaan tugas – tugas lain sesuai dengan kewenangannya.

Tugas dan Fungsi Pejabat Struktural Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Kepala Satuan

Mempunyai tugas memvalidasi penyusunan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja, merumuskan visi misi satuan, perumusan kebijakan teknis penegakan peraturan perundangan di daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat kebakaran, pengendalian administrasi umum, pengawasan melekat (waskat), monitoring, evaluasi dan pelaporan.

2. Sekretariat

Yang dipimpin oleh seorang Sekretaris mempunyai tugas menyusun rencana dan melaksanakan pengawasan dan pengendalian urusan umum, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, program, pengendalian dan pelaporan.

Sekretaris dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dibantu oleh tiga (3) Kepala sub Bagian:

a. Kepala Sub Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas dan fungsi merencanakan, menyusun, menghimpun dan melakukan penataan pelayanan administrasi ketatausahaan, arsip, kepegawaian dan pemeliharaan terhadap barang aset daerah/negara.

b. Kepala Sub Bagian Keuangan

Mempunyai tugas menyusun, menghimpun data rencana kebutuhan anggaran berupa pengelolaan gaji pegawai, perjalanan dinas dan biaya lainnya serta melakukan koordinasi dan verifikasi pertanggungjawaban pelaksanaan laporan pengelola keuangan dan pembukuan keuangan.

c. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan

Mempunyai tugas menyusun, menghimpun data sistematis program kegiatan, dan sosialisasi hasil pelaksanaan kegiatan, serta melakukan koordinasi dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan RENSTRA, dan RENJA Perangkat Daerah serta dokumen – dokumen laporan kinerja lainnya bagi pengembangan organisasi dan ketatalaksanaan Satuan.

3. Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah

Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah mempunyai tugas memimpin, menyusun rencana, perumusan pelaksanaan teknis, pembinaan, koordinasi pengendalian dan evaluasi.

Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dibantu oleh tiga (3) Kepala Seksi:

a. *Kepala Seksi Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Pembinaan*

Mempunyai tugas menyusun, melaksanakan kegiatan teknis operasional, menerima laporan dugaan pelanggaran, koordinasi dan melakukan pembinaan serta merancang kerjasama dengan Penyidik Pegawai Negeri Daerah dan Penyidik POLRI.

b. *Kepala Seksi Penyidikan dan Penyelidikan Pelanggaran Produk Hukum Daerah*

Mempunyai tugas melakukan pemeriksaan pelanggaran, penyidikan dan penyelidikan, melaksanakan tindakan non yustisial dalam aspek Preventif dan represif dan merencanakan kerjasama dengan penyidik POLRI.

c. *Sub Koordinator Substansi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan*

Mempunyai tugas mengembangkan kebijakan teknis operasional, mengikuti sosialisasi , melakukan penyuluhan dan pembinaan penegakan produk hukum daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, membuat laporan dan melakukan pemantauan, pengawasan dan pembinaan pelaksanaan fungsi pengendalian keamanan lingkungan, pengamanan pejabat dan pengamanan asset pemerintah daerah.

4. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai tugas memimpin, menyusun rencana, perumusan kebijakan teknis pembinaan, pengendalian ketenteraman masyarakat, koordinir penanganan darurat bencana alam dan kebakaran, kebersihan keindahan ketertiban (K3), pelaporan, dan evaluasi di bidang penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat.

Kepala Bidang Ketertiban dan ketenteraman Masyarakat dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dibantu oleh tiga (3) Kepala Seksi:

a. *Kepala Seksi Operasi*

Mempunyai tugas menyusun konsep operasi penertiban PKL, operasi ketenteraman dan ketertiban masyarakat, operasi penertiban asset pemerintah daerah dan operasi penertiban / pengendalian aksi unjuk rasa.

b. *Kepala Seksi Pengendalian*

Mempunyai tugas melakukan pengamanan, pengawalan kepala daerah dan pejabat pemerintah, menyusun rencana pengendalian ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta pengendalian unjuk rasa yang mengganggu aktivitas publik.

c. *Sub Koordinator Substansi Kerjasama*

Mempunyai tugas menganalisa, melaksanakan, mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pelaksanaan upacara kenegaraan dan upacara lainnya serta mengkaji dan mensinkronisasi pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

5. Bidang Pengembangan Kapasitas dan Sumber Daya Aparatur

Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas dan Sumber Daya Aparatur mempunyai tugas membuat rencana kerja, rencana teknis pengembangan kapasitas sarana prasarana dan kapasitas sumber daya aparatur satuan polisi pamong praja.

Kepala Bidang Pengembangan kapasitas dan sumber daya aparatur dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dibantu oleh tiga (3) Kepala Seksi:

a. *Kepala Seksi Pelatihan Dasar*

Mempunyai tugas menginventarisasi verifikasi data Anggota Satuan Polisi Pamong Praja, merancang kerjasama dengan TNI dan POLRI dan mendukung kegiatan operasional penegakan Produk Hukum Daerah .

b. *Sub Koordinator Substansi Teknis Fungsional Sat Pol PP*

Mempunyai tugas mengkoordinir dan pengarahan anggota Satuan Polisi Pamong Praja serta merencanakan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dasar bagi anggota satuan.

c. *Kepala Seksi Sumber Daya Aparatur Sat Pol PP*

Mempunyai tugas menyusun bahan, mengolah data kebijakan teknis dan fasilitasi pelatihan serta mengelola data administrasi PPNS.

6. Bidang Perlindungan Masyarakat

Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas menyusun rencana kerja di bidang Perlindungan Masyarakat (LINMAS), merumuskan kebijakan teknis operasional di bidang Linmas, melaksanakan pembinaan di bidang Linmas, koordinasi pengawasan/pengamanan pemilu, koordinasi penanganan bencana/konflik sosial, pengendalian operasional dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang Linmas.

Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dibantu oleh tiga (3) Kepala Seksi:

a. *Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat*

Mempunyai tugas mengumpulkan data dan informasi kajian masalah strategis, merancang kerjasama dan penguatan kelembagaan serta pelaksanaan pengamanan pemilu dan pencegahan konflik, pencegahan dan pengendalian kebakaran, bencana alam, pengamanan/ penanganan masalah di daerah.

b. *Sub Koordinator Substansi Bina Potensi Masyarakat*

Mempunyai tugas menginventarisir dan memfasilitasi elemen masyarakat, menyusun rencana kerja dalam rangka optimalisasi potensi pamswakarsa dan siaga bencana.

c. *Kepala Seksi Pencegahan Mitigasi dan Pengerahan SDM*

Mempunyai tugas mengembangkan pembinaan pencegahan, mitigasi bencana dan pengerahan sumber daya manusia serta pemeliharaan sistem peringatan dini bencana dan mengkoordinasikan upaya pengurangan resiko bencana.

7. Bidang Pemadam Kebakaran

Mempunyai tugas pencegahan dan pemadam kebakaran, pengadaan sarana prasarana kebakaran serta peningkatan kapasitas dan sumber daya satuan pemadam kebakaran. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Seksi:

a. *Kepala Seksi Pencegahan Kebakaran*

Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis pengembangan SDM anggota satuan pemadam kebakaran, merancang dan melaksanakan koordinasi lintas unit kerja kegiatan pencegahana penanggulangan kebakaran serta pengadaaan sarana pendukung kegiatan pencegahan kebakaran.

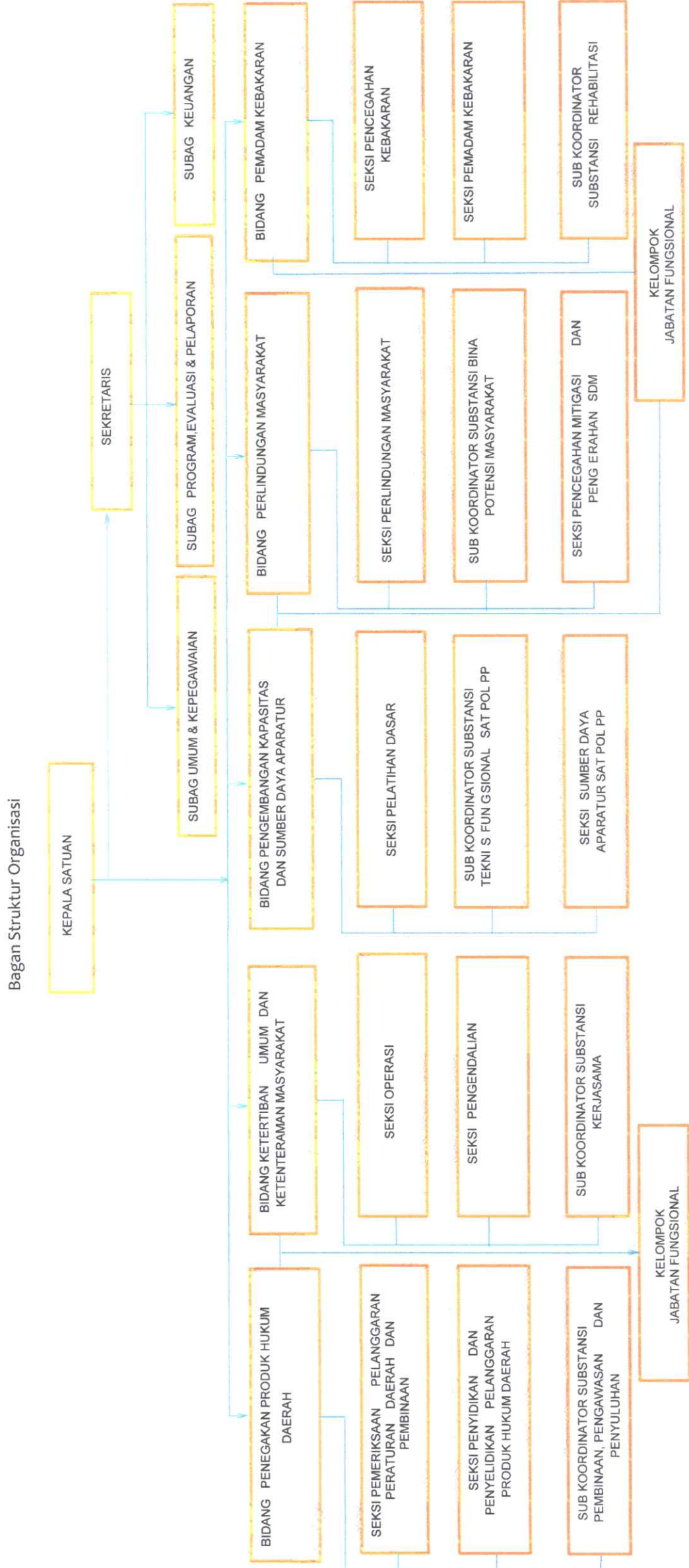
b. *Kepala Seksi Pemadam Kebakaran*

Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis pengembangan SDM anggota satuan pemadam kebakaran, merancang dan melaksanakan koordinasi lintas unit kerja kegiatan pencegahana penanggulangan kebakaran serta pengadaaan sarana pendukung kegiatan pencegahan kebakaran.

c. *Sub Koordinator Substansi Rehabilitasi*

Mempunyai tugas menyusun dan membuat rencana konsep bahan perumusan kebijakan teknis rehabilitasi, menyelenggarakan dan mengkoordinasikan perbaikan dan pemukiman semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai ke tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama normalisasi.

C. Struktur Organisasi



Dasar : Peraturan Bupati Ende Nomor 41 Tahun 2021

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

A. Sumber Daya Manusia

Jumlah aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende (keadaan Tahun 2025) adalah sebanyak 150 orang (dirinci berdasarkan status tingkat pendidikan dan status kepegawaian). Berikut disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.1.2.1
Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	PNS/P3K	Non-PNS	Jumlah
1.	S2	2	-	2
2.	S1	35	-	35
3.	Diploma	1	-	1
4.	SMA	111	-	111
4.	SMP	1	-	1
	Jumlah	150	-	150

Sumber : Inventaris Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2025

Tabel 2.1.2.2
Berdasarkan Bidang Tugas

No	Bidang Tugas	Eselon			Pelaksana		Jumlah
		II	III	IV	PNS/P3K	NON PNS	
1.	Kasat	1					1
2.	Sekretariat		1	3	8		12
3.	Bidang PPNS		1	2	9		15
4.	Bidang Trantib		1	2	36		39
5.	Bidang Kapasitas		1	2	4		7
6.	Bidang Linmas			2	14		16
7.	Bidang Damkar		1	3	57		61
	JUMLAH	1	5	14	128		150

Sumber : Inventaris Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2025

Tabel 2.1.2.3
Berdasarkan Pangkat/Gol.Ruang

No	Pangkat/Golongan	Jumlah (Orang)	Keterangan
1.	Pembina TK.1, IV/B	2	Eselon II-B Eselon III-A
2.	Pembina, IV/A	5	Eselon III-B dan Staf PD
3.	Penata Tk.I, III/D	9	Eselon III-B, IV-A dan Staf
4.	Penata, III/C	8	Eselon IV-A
5.	Penata Muda Tk.I, III/B	1	Staf
6.	Penata Muda, III/A	24	Pelaksana
7.	Pengatur Tk.I, II/D	13	Pelaksana
8.	Pengatur, II/C	10	Pelaksana
9.	Pengatur Muda Tk.I, II/B	1	Pelaksana
10.	Pengatur Muda, II/A	78	Pelaksana
11.	Juru Tk.I I/D	1	Pelaksana
	JUMLAH	150	

Sumber : Inventaris Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2025

Tabel 2.1.2.4
Diklat Struktural/Fungsional

No	Jenis Diklat	Jumlah (Orang)	Keterangan
1.	DIKLAT PIM II	-	
2.	DIKLAT PIM III	1	
3	DIKLAT PIM IV	4	

Sumber : Inventaris Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2025

Tabel 2.1.2.5
Diklat Dasar Khusus Bidang Pol PP, PPNS dan lainnya

No	Jenis Diklat	Jumlah (Orang)	Keterangan
1.	Diklat Dasar POL PP	10	
2.	Kompetensi Pengadaan Barang & Jasa	2	
3	Diklat PPNS	2	
4	Diklat Lainnya		

Sumber : Inventaris Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2025

B. Sarana Prasarana

Sarana Prasarana yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende keadaaan di awal Tahun 2025, diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1.2.6

Sarana Gedung Kantor

No	Nama Sarana	Jumlah	Kondisi	Keterangan
1.	Ruang Kerja Kasat	1 Ruang	Baik	
2.	Ruang Kerja Sekretariat	2 Ruang	Baik	
3.	Ruang Kerja Bidang	5 Ruang	Baik	
4.	Aula Pertemuan	1 Ruang	Baik	
5.	Ruang Tamu	1 Ruang	Baik	
5.	Ruang Sel	2 Ruang	Baik	
6.	Ruang Gudang	1 Ruang	Baik	
7.	Pos Jaga	1 Ruang	Baik	
8.	Garasi	1 Ruang	Baik	
9.	Kamar Mandi/Toilet	3 Ruang	Baik	

Sumber : Inventaris Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2025

Tabel 2.1.2.7

Prasarana / Peralatan Kerja Utama

No.	Jenis Sarana Dan Prasarana	Jumlah	Kondisi baik	Keterangan Rusak
1	2	3	4	5
1.	Pistol DH 7 Super Seven	4 buah	4	
2.	Sangkur	53 buah	53	
3.	AC	2 buah	1	1
4.	Komputer	6 Unit	4	2
5.	Parabola	1 buah	1	
6.	Televisi	1 buah	1	
7.	Laptop	4 unit	4	
8.	Printer	5 Unit	5	
9.	Kursi Plastik	40 buah	36	4
10.	Kursi Kerja Kayu	22 buah	22	
11.	Meja Biro	23 buah	22	1
12.	Sepeda Motor Roda Dua	13 buah	10	3
13.	Mobil Patroli	3 buah	2	1
14.	Mobil Damkar	3 buah	2	1
15.	Lemari	8 buah	4	4

16.	Rak Buku	2 buah	2	
17.	Kursi Sofa	2 set	1	1
18.	White Board	4 buah	4	
19.	Jam Dinding	2 buah		2
20.	Tameng	33 buah	31	2
21.	Pentungan karet	100 buah	100	
22.	Pentungan rotan	100 buah	30	70
23.	Pakaian PHH	33 pasang	33	
24.	Dispenser	2 buah	1	1
25.	Proyektor	1 buah		1
26.	Warles	1 Unit	1	
27.	Handycame	1 buah	1	
28.	Senter Selang	1 buah	1	
29.	Baju Tahan Panas	7 buah	7	
30.	Selang Pemadam Kebakaran	2 Rol	2	
31.	Jet Nozzleo	2 Buah	2	
32.	Pakaian tahan api	2 unit	2	
33.	Alat komunikasi radio UHF	1 unit	1	
34.	HT tahan air	3 unit	3	
35.	Helm pemadan	3 Unit	3	
36.	Respirator plu kaca mata pelindung	3 Unit	3	
37.	Sarung tangan tahan panas	3 Unit	3	
38.	Senter kepala tahan air	3 Unit	3	
39.	Sepatu magnum kebakaran	5 pasang	5	
40.	Mikrofon	1 Unit	1	
41.	Pos Jaga	1 Buah	1	
42.	Mesin Absen	1 buah	1	
43.	Baju Anti Lebah	4 buah		
44.	Kapak Tajam Kayu Hutan	1 buah		
45.	Handlamp Led Cree	4 buah		
46.	Penjepit Ular	2 buah		
47.	Sarung premium biasa	10 buah		
48.	Jas Hujan	10 buah		
49.	Gergaji Mesin	1 buah		
50.	Munja Fire Senter Bear 40 Watt	1 buah		
51.	Y Connection 2,5 inch	1 buah		

52.	Nozzle gun	1 buah		
53.	Selang damkar ninja karet 2,5 inch	1 roll		
54.	Headlamp leed cree	4 buah		
55.	Valve ball	1 buah		

Sumber : Inventaris Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2025

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Merupakan Review pencapaian kinerja dari segi kinerja dan penganggaran yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra dengan RPJMD periode sebelumnya untuk menjaga konsistensi dari pengembangan kualitas perencanaan strategis, mewujudkan *good governance* dan *clean government*, dapat dilihat pada **Tabel** berikut :

Tabel 2.1.3.1

Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

No	Indikator Kinerja Program	Target SPM/IKK	Target Renstra Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capain pada Tahun ke				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	SPM																
	Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat																
1.	Menurunnya Kasus pelanggaran terhadap Perda	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Persentase pelanggaran terhadap Perda yang diselesaikan	100%	10%	10%	20%	30%	30%	5%	5%	30%	30%	30%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Menurunnya kasus konflik Sosial yang terjadi	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Persentase kasus konflik sosial yang diselesaikan	100%	10%	10%	20%	30%	30%	10%	10%	20%	30%	30%	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Tingkat Waktu tanggap (respon time) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2.1.3.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende 2020-2024

No	Uraian	Anggaran pada tahun (Rp.)					Realisasi anggaran pada tahun (Rp.)					Rasio antara Realisasi dan anggaran				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
BELANJA																
1	Belanja Operasi			8.198.816.113	5.961.441.819	7.756.514.329			8.007.060.208	5.657.136.963	7.313.982.733			97,66%	94,53%	94,29%
2	Belanja Pegawai			4.966.021.734	5.117.895.319	6.331.672.539			4.811.218.461	4.860.557.046	6.330.432.519			97,66%	94,50%	99,98%
3	Belanja Barang dan Jasa			3.197.794.379	843.546.500	1.424.841.700			3.160.841.747	773.264.917	98..550.194			96,88%	94,97%	69,02%
4	Belanja Modal			-	23.315.000	55.200.000			-	23.315.000	54.800.000			98,84%	91,67%	99,27%
5	Belanja Hibah			35.000.000					35.000.000						100%	

Sumber : Inventaris Sub Bagian Keuangan Tahun 2024

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Pada dasarnya tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja adalah dibidang ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat, dimana pelayanannya berupa penertiban atas pelanggaran perda/perkada, penanganan kejadian kebakaran dan kejadian yang membahayakan manusia dan penanganan pengaduan masyarakat.

Adapun kelompok sasaran pelayanan adalah masyarakat umum adalah:

1. Masyarakat umum dan kalangan pengusaha

Yang dimaksud masyarakat umum disini adalah pedagang kaki lima (PKL), pengusaha, penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) seperti gelandangan dan pengemis dan masyarakat yang melakukan pengaduan terkait gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.

2. Instansi Pemerintah (Satpol PP) Kabupaten Ende pemberian pelayanan disini adalah berupa :

- Pengamanan pejabat ketika kunjungan dinas ke kota Ende
- Pengamanan wilayah ketika ada acara penting di semua instansi pemerintah yang membutuhkan.
- Pemberian latihan terkait pelaksanaan upacara hari Senin dan hari besar nasional kepada petugas upacara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ende

A. Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan

Dalam menjalankan tugas terdapat mitra dalam pelayanan antara lain berupa kerjasama dan koordinasi sehingga ketenteraman dan ketertiban umum dapat terwujud. Kerjasama didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu, dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan herarki dan kode etik birokrasi.

Adapun beberapa mitra kerja Satuan Polisi Pamong Praja antar lain :

1. Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya dapat meminta bantuan dan/atau bekerjasama dengan Kepolisian dan/atau instansi vertikal lainnya.
2. Satpol PP dalam hal meminta bantuan kepada Kepolisian dan/atau instansi vertikal lainnya bertindak selaku koordinator operasi lapangan.
3. Kerjasama dengan dinas lain seperti Dinsos, Kesbangpol, BPBD, Disperindag, BPBD, Dispendukcapil, Dinkes, Bea Cukai, Balai POM Kabupaten Ende dimana kerjasama tersebut berupa koorinasi yang bertujuan untuk menciptakan

ketenteraman dan ketertiban umum di masyarakat.

4. Bermitra dengan Satlinmas dan Babinsa Desa/Kecamatan
Dalam menjaga lingkungan di masyarakat dilaksanakan kerjasama antara Satlinmas dan Babinsa yang berada di Desa/Kelurahan yang bertujuan untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat.
5. Bermitra dengan Dinas perhubungan dan Kesbangpol
Dalam penanganan ketenteraman dan ketertiban umum di butuhkan kerjasama dengan dinas perhubungan, yang bertujuan untuk pengamanan terkait arus lalu lintas kegiatan pengamanan dan Pengawalan tamu pejabat, pengamanan Pilkada dan acara- acara besar yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Ende dan kerjasama dengan Kesbangpol yang bertujuan untuk pemantau terhadap isu-isu yang berkembang di masyarakat yang membahayakan negara.
6. Bermitra dengan Dinas Sosial
Dalam kegiatan SATPOL PP terdapat patroli wilayah dan terdapat hasil patrol yaitu berupa penertiban Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) seperti gelandangan, pengemis, di pinggir jalan raya. Adapun tindak lanjut dari hasil penertiban tersebut yaitu koordinasi dengan Dinas Sosial.
7. Bermitra dengan Anggota Satlinmas dan Babinsa Desa / Kecamatan dalam menjaga lingkungan di masyarakat dilaksanakan kerjasama antara Satlinmas dan Babinsa yang berada di Desa/Kelurahan. Adapun tujuannya adalah menjaga stabilnya ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat.
8. Bermitra dengan BPBD
Dalam kegiatan SATPOL PP terdapat Pemetaan Rawan Bencana baik Kebakaran dan Non Kebakaran.

B. Kerjasama Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas menciptakan ketenteraman dan ketertiban umum Satuan Polisi Pamong Praja melakukan kerjasama, dimana kerjasama tersebut terdiri dari kerjasama intern dan extern. Adapun bentuk kerjasama tersebut adalah :

1) Kerjasama intern

Yaitu kerjasama yang dilakukan antar bidang di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja, misalnya kerjasama antar bidang ketenteraman dan ketertiban umum dengan bidang perlindungan masyarakat dan bidang penegakan produk hukum daerah.

2) Kerjasama extern

Yang dimaksud disini adalah kerjasama yang dilakukan dengan instansi lain dan jajaran samping yang bertujuan untuk mewujudkan ketenterman dan ketertiban umum, adapapun bentuk kerjasama tersebut adalah :

a. Kerjasama “Tiga Pilar”

Kerjasama ini yang terdiri dari Satpol PP, TNI dan POLRI. Tujuan dari Tiga Pilar ini adalah untuk peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum di masyarakat.

Kegiatan tiga pilar ini adalah patroli wilayah dengan sasaran tempat rawan konflik dan tempat yang diduga terjadinya kegiatan prostitusi. Kerjasama tiga pilar ini masuk dalam kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Kerjasama Antar Lembaga dan Kementrian Dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang di ampuh oleh seksi Kerjasama. Adapun kerjasama ini dilakukan setiap tahun.

b. Kerjasama “operasi rokok ilegal”

Bentuk kerjasama ini adalah dilakukan dengan kantor bea cukai yang bertujuan menekan peredaran rokok ilegal, adapapun instansi didalamnya antara lain Satuan Polisi Pamong Praja, TNI/POLRI, bagian Ekonomi dan bagian cukai Kabupaten Ende, kegiatan ini di ampuh oleh bidang penegakan produk hukum daerah dinas perdagangan. Adapun waktu kerjasama ini dilakukan setiap tahun. Kegiatan tersebut adalah :

c. Operasi rokok ilegal. Kegiatan tersebut berupa kegiatan operasi rokok yang ilegal/yang tidak berlabel dari cukai yang dilakukan di Kabupaten Lumajang. Dengan di adakannya operasi tersebut dengan harapan mengurangi penjual rokok ilegal sehingga menambah pendapatan negara. Kegiatan ini masuk dalam kegiatan Penegakan Perda Kabupaten /Kota dan Peraturan Bupati/Walikota di sub.kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati /Walikota dan sub.kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota

d. Sosialisasi perundang undangan barang kenai cukai, dimana peserta sosialisasi tersebut adalah para pedagang.

2.2 Permasalahan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

Sesuai dengan tugas dan fungsi SATPOL PP Kabupaten Ende serta dikaitkan dengan kondisi obyektif di lapangan yang berkenaan dengan konteks penegakkan Perda dan Perkada serta penyelenggaran ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat, dapat diidentifikasi permasalahan -permasalahan sebagai berikut:

Tabel 2.2.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SATPOL PP

Aspek Kajian	Capain (Kondisi Saat ini)	Standar Yang Digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalaha n Pelayanan
			Internal (Kewenangan SATPOL PP)	Eksternal (diluar Kewenangan SATPOL PP)	
Peraturan Perundangan	Tersedianya Perda dan Perbup tentang SATPOL PP	UU Nomor 18 Tahun 2016 dan PP Nomor 16 Tahun 2018	Perubahan Standar Mutu Pelayanan Dasar urusan Penegakkan Perda dan Perkada terkait Trantibum dan Linmas	Demografi kontur wilayah dan ratio jumlah penduduk	Belum optimal pelayanan minimal tugas dan fungsi SATPOL PP
Sumber Daya Manusia	Pelaksanaan rencana program kerja belum optimal	UU Nomor 5 Tahun 2014	Proses adapatasi dengan tugas dan fungsi yang baru	Kuota perekrutan aparatur yang terbatas dan belum sesuai standar komptensi yang ada	Belum terpenuhi nya kualitas dan kuantitas aparatur Satpol PP
Sumber Daya Anggaran	Hanya dapat memenuhi kebutuhan reguler (rutin) organisasi	Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Perda APBD	Rancangan kebutuhan anggaran	Kebijakan oleh Tim Penentu anggaran APBD	Belum optimal pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP
Sarana Dan Prasarana	Belum memadai	PP Nomor 7 Tahun 2006	Masih terbatas sarana dan prasarana operasional	Kebijakan oleh Tim Penentu anggaran APBD	Belum terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang tugas SATPOL PP
Pemetaan Daerah Rawan	Pemetaan daerah rawan	Perda Kab.Ende	Ketertabatasa n personel SATPOL PP	Kebijakan oleh Tim Penentu	Belum tersedia data potensi

Gangguan Trantibum dan Trantibmas	gangguan /konflik sosial			anggaran APBD	rawan gangguan trantibum dan trantibmas
Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibum dan Trantibmas	Kerjasama belum berjalan dengan optimal	Permendagri Nomor 54 Tahun 2011	Ketersediaan anggaran yang terbatas	Terkendala penegakan peraturan perundang - undangan	Belum optimal peran serta masyarakat
Penyelenggara-an Trantibum, Trantibmas dan Linmas	Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan dan Patroli	Permendagri Nomor 121 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2011	Koordinasi terpadu antar Organisasi terkait dan stake holder	Persepsi antar pihak terkait belum seragam	Belum terwujudnya pola standar baku

2.3. Isu-Isu Strategis

Dari identikasi permasalahan yang dihadapi SATPOL PP Kabupaten Ende, serta memperhatikan Visi, Misi RPJMD Kabupaten Tahun 2025 – 2029, maka rumusan Isu Strategis Satpol PP dilakukan melalui teknik menyimpulkan isu strategis seperti tertera pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2.2 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi yang menjadi kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu Kas Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis Relevan Dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
1. UU Nomor 18 Tahun 2016	Ketersediaan Anggaran terbatas	1. Ancaman terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat;	Supremasi Hukum	Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia, difokuskan pada pembaharuan substansi hukum; pengembangan budaya hukum dan transformasi kelembagaan hukum yang mengedepankan keseimbangan antara kepastian, keadilan, kemanfaatan, dan perdamaian berlandaskan Pancasila; transformasi tata kelola keamanan dalam negeri, keamanan dan ketertiban masyarakat, menjaga stabilitas harga yang dapat menjaga daya beli masyarakat dan kepercayaan investor serta menjaga keberlanjutan fiskal yang adaptif	Isu Strategis Transformasi Sosial, difokuskan pada peningkatan kualitas hidup manusia pada seluruh siklus hidup manusia untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan kohesif. Tercapainya transformasi sosial bertumpu pada upaya pemenuhan pelayanan dasar serta pengembangan modal manusia dan modal sosial budaya yang berkaitan dengan kesehatan untuk semua, pendidikan yang berkualitas dan merata, dan perlindungan sosial yang adaptif.	1. Ancaman terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. UU Nomor 5 Tahun 2014	peningkatan kualitas SDM,	2. Keterlibatan masyarakat terhadap penegakkan Peraturan Daerah	Hukum			2. Keterlibatan masyarakat terhadap penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
3. UU Nomor 5 Tahun 2014	Sumber daya sarana dan prasarana	dan Peraturan Daerah				3. Mendorong kesadaran hukum masyarakat melalui pendekatan humanis dan persuasif;
4. PP Nomor 16 Tahun 2018	operasional bagi kepentingan pelayanan publik demi mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum,	3. Tuntutan peningkatan kesiagaan bencana bahaya kebakaran dan rehabilitasi pasca kebakaran				4. Tuntutan peningkatan kesiagaan bencana bahaya kebakaran dan rehabilitasi pasca kebakaran
5. Permendagri Nomor 121 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2011	mengingat bahwa urusan ketenteraman dan ketertiban umum adalah urusan / wajib.					
6. Perda Nomor 2 Tahun 2023						

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja adalah:

1. Ancaman terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Keterlibatan masyarakat terhadap penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
3. Mendorong kesadaran hukum masyarakat melalui pendekatan humanis dan persuasif;
4. Tuntutan peningkatan kesiagaan bencana bahaya kebakaran dan rehabilitasi pasca bencana.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan Organisasi. Visi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende merupakan skenario masa depan Satuan Polisi Pamong Praja agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi ini merupakan suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan ke dalam tujuan dan sasaran program kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende. Rumusan Visi Bupati dan Wakil Bupati adalah: **“Terwujudnya Kabupaten Ende Yang Maju, Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Berbasiskan Iman Dan Budaya Ende Lio Nage Sare Pawe”**

Pencapaian Visi Kabupaten Ende tidak akan terwujud tanpa mengemban Misi yang jelas sebagai upaya untuk mewujudkan Visi tersebut. Misi dari sebuah kelembagaan adalah tonggak / tiang dari perencanaan strategisnya, sehingga “sepak terjang” kelembagaan dapat dikatakan merupakan implementasi dari Visi kelembagaannya. Berkaitan hal di atas, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende melaksanakan Misi kedua **Mewujudkan peningkatan produktivitas masyarakat melalui pengembangan aktivitas ekonomi yang adil, pro rakyat, serta ramah investasi dan berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru.**

Perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan jangka menengah Organisasi yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan indikator kinerja sasaran/tujuan dan berperan penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan program kerja organisasi. Visi, misi, tujuan dan sasaran jangka menengah SATPOL PP Kabupaten Ende Tahun 2025-2029, dirumuskan sebagai berikut:

Tabel 3.1.1

**Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025-2029**

Visi Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2025-2029:	
Terwujudnya Kabupaten Ende Yang Maju, Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Berbasis Iman Dan Budaya Ende Lio Nage Sare Pawe”	
Misi:	
Mewujudkan peningkatan produktivitas masyarakat melalui pengembangan aktivitas ekonomi yang adil, pro rakyat, serta ramah investasi dan berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru	
Tujuan:	
Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta mitigasi dan penanggulangan bencana Kebakaran.	
Sasaran:	
1. Meningkatnya Akutabilitas Kinerja.	
2. Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban masyarakat serta Penegakkan Peraturan Daerah	
3. Meningkatnya pelayanan pemadam kebakaran yang sesuai standar.	

Tabel 3.1.2

Tujuan dan Sasaran Renstra SATPOL PP

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Pada Tahun Ke -				
				2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta mitigasi dan penanggulan bencana Kebakaran.	1. Meningkatnya Akutabilitas Kinerja.	1. Nilai Akip Satuan Polisi Pamong Praja	b	b	b	b	b
		2. Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat Serta Penegakkan Peraturan Daerah;	2. Persentase Pelanggaran Ketertiban Umum dan Ketentruman Masyarakat yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%
			3. Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	100%	100%	100%	100%	100%
		3. Meningkatnya Pelayanan Pemadam Kebakaran sesuai standar	1. Persentase pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%

Hubungan Tujuan dan Sasaran Jangkah Menengah Satuan Polisi Pamong Praja dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD

Tabel 3.1.3

Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Jangkah Menengah Satuan Polisi Pamong Praja dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran
(1)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	1. Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Indeks Trantibum Angka Kriminalitas	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta mitigasi dan penanggulangan bencana Kebakaran	1. Meningkatnya Akutabilitas Kinerja. 2. Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat Serta Penegakkan Peraturan Daerah;	1.Nilai Akip Satuan Polisi Pamong Praja 2.Persentase Pelanggaran Ketertiban Umum dan Ketentrman Masyarakat yang tertangani 3.Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan
	2. Meningkatnya mitigasi dan penanggulangan bencana	Indeks Resiko Bencana		Meningkatnya pelayanan pemadam kebakaran yang sesuai standar	1. Persentase pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran sesuai standar 2. Persentase layanan informasi dan edukasi Rawan kebakaran

3.2 Srtategi Dan Arah Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende maka dapat ditempuh melalui cara merumuskan strategi dan arah kebijakan yang selaras dengan Strategi Dan Kebijakan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Kabupaten Ende Tahun 2025 - 2029, agar hasil-hasil pelaksanaan program dan kegiatan kelembagaan bukan hanya fokus pada penyerapan anggaran saja, namun juga memperhatikan unsur hasil berdampak kemanfaatannya bagi masyarakat (*benefit outcome*).

3.2.1 Strategi

Strategi yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende adalah sebagai berikut :

1. Meminimalisasi terjadinya ancaman terhadap ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
2. Memberdayakan potensi masyarakat melalui pembinaan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende dalam upaya mengatasi masalah Ketentrman dan Ketertiban Umum, penegakan Perda dan perlindungan masyarakat.

3. Memberdayakan potensi masyarakat melalui pembinaan, Penyuluhan / sosialisasi dalam upaya mengatasi masalah serta penanganan kasus Kebakaran dan Non Kebakaran
4. Meningkatkan kinerja layanan pemerintah dan layanan publik.

3.2.2 Arah Kebijakan

1. Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan;
2. Peningkatan pemantauan, penertiban dan pengendalian terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan atau Peraturan Kepala Daerah;
3. Peningkatan kesiagaan bencana Kebakaran;
4. Meningkatnya kinerja Perencanaan, penganggaran, pelaporan dan Evaluasi
5. Peningkatan kesiagaan Aparatur dalam mengamankan wilayah dari tindak kriminal melalui sosialisasi kewaspadaan dini/deteksi dini.

Tabel 3.2.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Araha Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkat nya ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta mitigasi dan penanggula ngan bencana Kebakaran.	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat Serta Penegakkan Peraturan Daerah;	1. Meminimalisasi terjadinya ancaman terhadap ketenteraman dan ketertiban masyarakat; 2. Memberdayakan potensi masyarakat melalui pembinaan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende dalam upaya mengatasi masalah Ketentraman dan Ketertiban Umum, penegakan Perda dan perlindungan masyarakat.	1.Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 2. Peningkatan pemantauan, penertiban dan pengendalian terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan atau Peraturan Kepala Daerah 3. Peningkatan kesiagaan Aparatur dalam mengamankan wilayah dari tindak kriminal melalui sosialisasi kewaspadaan dini/deteksi dini
	Meningkatnya Pelayanan Pemadam Kebakaran sesuai standar	Memberdayakan potensi masyarakat melalui pembinaan, Penyuluhan / sosialisasi dalam upaya mengatasi masalah serta penanganan kasus Kebakaran dan Non Kebakaran	Peningkatan kesiagaan bencana Kebakaran
	Meningkatnya Akutabilitas Kinerja.	Meningkatkan kinerja layanan pemerintah dan layanan publik	Meningkatnya kinerja Perencanaan, penganggaran, pelaporan dan Evaluasi

BAB IV
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.

4.1 Uraian Program

Program Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam kurun waktu lima (5) tahun periode Renstra tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota.
2. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum.
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

4.2 Uraian Kegiatan

Uraian Kegiatan dari tiga Program yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dengan kegiatan :
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum dengan kegiatan :
 - a. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
 - c. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten / Kota
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran dengan kegiatan :
 - a. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran
 - c. Investigasi Kejadian Kebakaran
 - d. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia
 - e. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran

4.3 Uraian Sub Kegiatan

Uraian Sub Kegiatan dari tiga Program, enam belas adalah sebagai berikut

(1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dengan kegiatan:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - h. Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
 - i. Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
 - j. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - k. Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD
 - l. Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - d. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD
 - g. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
 - h. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - b. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 - c. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
 - d. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
 - e. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

- f. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- g. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- h. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
 - b. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 - c. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - d. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
 - e. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 - f. Pemulangan Pegawai yang Pensiun
 - g. Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas
 - h. Pemindahan Tugas ASN
 - i. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - j. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - f. Penyediaan Bahan/Material
 - g. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - i. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - j. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - d. Pengadaan Mebel
 - e. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - f. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- b. Pemeliharaan Mebel
- c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- d. pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
- e. Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- f. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

(2) Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum, dengan kegiatan:

1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan :
 - a. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan.
 - b. Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
 - c. Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
 - d. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - e. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
 - f. Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - g. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - h. Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
 - i. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional
 - j. Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP
 - k. Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan
 - l. Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah

- m. Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota
- 2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Sub Kegiatan :
 - a. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
 - b. Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
 - c. Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - d. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)
 - e. Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - f. Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah
 - g. Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah
 - h. Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
- 3. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten / Kota Sub Kegiatan :
 - a. Pembentukan Sekretariat PPNS
 - b. Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah
 - c. Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah
 - d. Dukungan Operasional Sekretariat PPNS
 - e. Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS
- (3) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran.
- Kegiatan
 - 1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan :
 - a. Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - c. Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
 - d. Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - e. Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri

- f. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
- g. Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran
- h. Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)
- i. Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)
- j. Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)
- k. Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)
- l. Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran
- m. Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
- n. Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga
2. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran
Sub Kegiatan :
 - a. Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
 - b. Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
3. Investigasi Kejadian Kebakaran
Sub Kegiatan :
Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran
4. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia
Sub Kegiatan :
 - a. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia
 - b. Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi
 - c. Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana
 - d. Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi
5. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
Sub Kegiatan :
 - a. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
 - b. Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran

- c. Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana
- d. Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran

Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / dan Pendanaan

Rencana program/kegiatan serta pendanaan indikatif pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende Tahun 2026-2030 dapat dilihat pada Tabel berikut:

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KABUPATEN ENDE

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				7.750.000.000,00		7.901.900.000,00		8.123.153.200,00		8.431.833.020,00		8.721.188.278,00		
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6.500.000.000,00		6.627.400.000,00		6.812.967.200,00		7.071.859.953,00		7.269.872.031,00		
Persentase Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun				6.500.000.000,00		6.627.400.000,00		6.812.967.200,00		7.071.859.953,00		7.269.872.031,00	1.05.0.00.0.00.06.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			21.000.000,00		21.315.000,00		21.634.729,00		21.639.524,00		21.964.113,00		
1.05.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10.000.000,00		10.150.000,00		10.302.250,00		10.304.534,00		10.459.102,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		6	10.000.000,00	6	10.150.000,00	6	10.302.250,00	6	10.304.534,00	6	10.459.102,00		
1.05.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				500.000,00		507.500,00		515.113,00		515.227,00		522.955,00		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)		1	500.000,00	1	507.500,00	1	515.113,00	1	515.227,00	1	522.955,00		
1.05.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				500.000,00		507.500,00		515.113,00		515.227,00		522.955,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)		1	500.000,00	1	507.500,00	1	515.113,00	1	515.227,00	1	522.955,00		
1.05.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				500.000,00		507.500,00		515.113,00		515.227,00		522.955,00		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)		1	500.000,00	1	507.500,00	1	515.113,00	1	515.227,00	1	522.955,00		
1.05.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				500.000,00		507.500,00		515.113,00		515.227,00		522.955,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)		1	500.000,00	1	507.500,00	1	515.113,00	1	515.227,00	1	522.955,00		
1.05.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				500.000,00		507.500,00		515.113,00		515.227,00		522.955,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		6	500.000,00	6	507.500,00	6	515.113,00	6	515.227,00	6	522.955,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.000.000,00		2.030.000,00		2.060.450,00		2.060.907,00		2.091.820,00	1.05.0.00.0.00.06.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		6	2.000.000,00	6	2.030.000,00	6	2.060.450,00	6	2.060.907,00	6	2.091.820,00		
1.05.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				500.000,00		507.500,00		515.113,00		515.227,00		522.955,00		
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)		1	500.000,00	1	507.500,00	1	515.113,00	1	515.227,00	1	522.955,00		
1.05.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				500.000,00		507.500,00		515.113,00		515.227,00		522.955,00		
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)		1	500.000,00	1	507.500,00	1	515.113,00	1	515.227,00	1	522.955,00		
1.05.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				500.000,00		507.500,00		515.113,00		515.227,00		522.955,00		
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)		1	500.000,00	1	507.500,00	1	515.113,00	1	515.227,00	1	522.955,00		
1.05.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD				5.000.000,00		5.075.000,00		5.151.125,00		5.152.267,00		5.229.551,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)		5	5.000.000,00	5	5.075.000,00	5	5.151.125,00	5	5.152.267,00	5	5.229.551,00		
1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			6.093.200.000,00		6.214.513.000,00		6.393.886.896,50		6.652.686.750,11		6.844.411.228,82		
1.05.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				6.061.700.000,00		6.182.540.500,00		6.361.434.807,50		6.620.227.467,11		6.811.465.057,82		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		150	6.061.700.000,00	150	6.182.540.500,00	150	6.361.434.807,50	150	6.620.227.467,11	150	6.811.465.057,82		
1.05.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				10.000.000,00		10.150.000,00		10.302.250,00		10.304.534,00		10.459.102,00		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		12	10.000.000,00	12	10.150.000,00	12	10.302.250,00	12	10.304.534,00	12	10.459.102,00		
1.05.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				15.000.000,00		15.225.000,00		15.453.375,00		15.456.801,00		15.688.653,00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)		50	15.000.000,00	50	15.225.000,00	50	15.453.375,00	50	15.456.801,00	50	15.688.653,00		
1.05.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				500.000,00		507.500,00		515.113,00		515.227,00		522.955,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)		1	500.000,00	1	507.500,00	1	515.113,00	1	515.227,00	1	522.955,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				500.000,00		507.500,00		515.113,00		515.227,00		522.955,00	1.05.0.00.0.00.06 0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		1	500.000,00	1	507.500,00	1	515.113,00	1	515.227,00	1	522.955,00		
1.05.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				500.000,00		507.500,00		515.113,00		515.227,00		522.955,00		
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemerksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)		1	500.000,00	1	507.500,00	1	515.113,00	1	515.227,00	1	522.955,00		
1.05.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				2.000.000,00		2.030.000,00		2.060.450,00		2.060.907,00		2.091.820,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		1	2.000.000,00	1	2.030.000,00	1	2.060.450,00	1	2.060.907,00	1	2.091.820,00		
1.05.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				3.000.000,00		3.045.000,00		3.090.675,00		3.091.360,00		3.137.731,00		
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		1	3.000.000,00	1	3.045.000,00	1	3.090.675,00	1	3.091.360,00	1	3.137.731,00		
1.05.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Indeks Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			1.600.000,00		1.624.000,00		1.646.843,00		1.648.727,38		1.673.456,30		
1.05.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				100.000,00		101.500,00		101.500,50		103.045,34		104.591,02		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		1	100.000,00	1	101.500,00	1	101.500,50	1	103.045,34	1	104.591,02		
1.05.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				100.000,00		101.500,00		103.023,50		103.045,34		104.591,02		
Tertaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		1	100.000,00	1	101.500,00	1	103.023,50	1	103.045,34		104.591,02		
1.05.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				100.000,00		101.500,00		103.023,50		103.045,34		104.591,02		
Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)		1	100.000,00	1	101.500,00	1	103.023,50	1	103.045,34	1	104.591,02		
1.05.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				100.000,00		101.500,00		103.023,50		103.045,34		104.591,02		
Tertaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		1	100.000,00	1	101.500,00	1	103.023,50	1	103.045,34	1	104.591,02		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				500.000,00		507.500,00		515.113,50		515.227,67		522.955,09	1.05.0.00.0.00.06.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		1	500.000,00	1	507.500,00	1	515.113,50	1	515.227,67	1	522.955,09		
1.05.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				500.000,00		507.500,00		515.113,50		515.227,67		522.955,09		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		1	500.000,00	1	507.500,00	1	515.113,50	1	515.227,67	1	522.955,09		
1.05.01.2.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				200.000,00		203.000,00		206.045,00		206.090,68		209.182,04		
Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		1	200.000,00	1	203.000,00	1	206.045,00	1	206.090,68	1	209.182,04		
1.05.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			28.100.000,00		28.514.000,00		28.949.322,50		28.955.740,86		29.390.075,95		
1.05.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				500.000,00		507.500,00		515.112,50		515.226,69		522.955,09		
Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)		1	500.000,00	1	507.500,00	1	515.112,50	1	515.226,69	1	522.955,09		
1.05.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				5.000.000,00		5.075.000,00		5.151.125,00		5.152.267,88		5.229.550,88		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)		1	5.000.000,00	1	5.075.000,00	1	5.151.125,00	1	5.152.267,88	1	5.229.550,88		
1.05.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				500.000,00		507.500,00		515.112,50		515.226,69		522.955,09		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)		1	500.000,00	1	507.500,00	1	515.112,50	1	515.226,69	1	522.955,09		
1.05.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				100.000,00		101.500,00		103.022,50		103.045,34		104.591,02		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)		1	100.000,00	1	101.500,00	1	103.022,50	1	103.045,34	1	104.591,02		
1.05.01.2.05.0006 - Pemulangan Pegawai yang Pensiun				500.000,00		507.500,00		515.112,50		515.226,69		522.955,09		
Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan (Orang)		1	500.000,00	1	507.500,00	1	515.112,50	1	515.226,69	1	522.955,09		
1.05.01.2.05.0008 - Pemindahan Tugas ASN				500.000,00		500.000,00		515.112,50		515.226,69		522.955,09		
Terlaksananya Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan (Orang)		1	500.000,00	1	500.000,00	1	515.112,50	1	515.226,69	1	522.955,09		
1.05.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				20.000.000,00		20.300.000,00		20.604.500,00		20.609.067,50		20.918.203,51		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)		1	20.000.000,00	1	20.300.000,00	1	20.604.500,00	1	20.609.067,50	1	20.918.203,51		
1.05.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				500.000,00		507.500,00		515.112,50		515.226,69		522.955,09		
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)		150	500.000,00	150	507.500,00	150	515.112,50	150	515.226,69	150	522.955,09		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				500.000,00		507.500,00		515.112,50		515.226,69		522.955,09	1.05.0.00.0.00.06.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)		1	500.000,00	1	507.500,00	1	515.112,50	1	515.226,69	1	522.955,09		
1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah			136.100.000,00		138.141.500,00		119.815.167,50		140.244.705,35		142.348.375,01		
1.05.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000,00		10.150.000,00		103.022,50		10.304.533,75		10.459.101,76		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		3	10.000.000,00	3	10.150.000,00	3	103.022,50	3	10.304.533,75	3	10.459.101,76		
1.05.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				20.000.000,00		20.300.000,00		20.604.500,00		20.609.067,50		20.918.203,51		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		3	20.000.000,00	3	20.300.000,00	3	20.604.500,00	3	20.609.067,50	3	20.918.203,51		
1.05.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10.000.000,00		10.150.000,00		10.302.250,00		10.304.533,75		10.459.101,76		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		3	10.000.000,00	3	10.150.000,00	3	10.302.250,00	3	10.304.533,75	3	10.459.101,76		
1.05.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				20.000.000,00		20.300.000,00		20.604.500,00		20.609.067,50		20.918.203,51		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		3	20.000.000,00	3	20.300.000,00	3	20.604.500,00	3	20.609.067,50	3	20.918.203,51		
1.05.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				10.000.000,00		10.150.000,00		103.022,50		10.304.533,75		10.459.101,76		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		3	10.000.000,00	3	10.150.000,00	3	103.022,50	3	10.304.533,75	3	10.459.101,76		
1.05.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				100.000,00		101.500,00		103.022,50		103.045,34		104.591,02		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		1	100.000,00	1	101.500,00	1	103.022,50	1	103.045,34	1	104.591,02		
1.05.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material				5.000.000,00		5.075.000,00		5.151.125,00		5.152.267,88		5.229.550,88		
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)		1	5.000.000,00	1	5.075.000,00	1	5.151.125,00	1	5.152.267,88	1	5.229.550,88		
1.05.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				10.000.000,00		10.150.000,00		10.302.250,00		10.304.533,75		10.459.101,76		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)		3	10.000.000,00	3	10.150.000,00	3	10.302.250,00		10.304.533,75	3	10.459.101,76		
1.05.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50.000.000,00		50.750.000,00		51.511.250,00		51.522.668,75		52.295.508,87		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		5	50.000.000,00	5	50.750.000,00	5	51.511.250,00	5	51.522.668,75	5	52.295.508,87		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				500.000,00		507.500,00		515.112,50		515.226,69		522.955,09	1.05.0.00.0.00.06.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)		1	500.000,00	1	507.500,00	1	515.112,50	1	515.226,69	1	522.955,09		
1.05.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				500.000,00		507.500,00		515.112,50		515.226,69		522.955,09		
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)		1	500.000,00	1	507.500,00	1	515.112,50	1	515.226,69	1	522.955,09		
1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			60.000.000,00		60.900.000,00		61.831.500,00		61.827.202,51		62.754.610,54		
1.05.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				35.000.000,00		35.525.000,00		36.075.875,00		36.065.868,13		36.606.856,15		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)		1	35.000.000,00	1	35.525.000,00	1	36.075.875,00	1	36.065.868,13	1	36.606.856,15		
1.05.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				10.000.000,00		10.150.000,00		10.302.250,00		10.304.533,75		10.459.101,76		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)		2	10.000.000,00	2	10.150.000,00	2	10.302.250,00	2	10.304.533,75	2	10.459.101,76		
1.05.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				15.000.000,00		15.225.000,00		15.453.375,00		15.456.800,63		15.688.652,63		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		2	15.000.000,00	2	15.225.000,00	2	15.453.375,00	2	15.456.800,63	2	15.688.652,63		
1.05.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		0		0		
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)			0		0		0		0		0		
1.05.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		0		0		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)			0		0		0		0		0		
1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			70.000.000,00		71.050.000,00		72.115.750,00		72.131.737,26		73.213.712,29		
1.05.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000,00		5.075.000,00		5.151.125,00		5.152.267,88		5.229.550,88		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		500	5.000.000,00	500	5.075.000,00	500	5.151.125,00	500	5.152.267,88	500	5.229.550,88		
1.05.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				20.000.000,00		20.300.000,00		20.604.500,00		20.609.067,50		20.918.203,51		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		36	20.000.000,00	36	20.300.000,00	36	20.604.500,00	36	20.609.067,50	36	20.918.203,51		
1.05.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				20.000.000,00		20.300.000,00		20.604.500,00		20.609.067,50		20.918.203,51		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		5	20.000.000,00	5	20.300.000,00	5	20.604.500,00	5	20.609.067,50	5	20.918.203,51	1.05.0.00.0.00.06.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				25.000.000,00		25.375.000,00		25.755.625,00		25.761.334,38		26.147.754,39		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		12	25.000.000,00	12	25.375.000,00	12	25.755.625,00	12	25.761.334,38	12	26.147.754,39		
1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daera			90.000.000,00		91.342.500,00		113.086.991,50		92.725.565,53		94.116.459,09		
1.05.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Penzinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				50.000.000,00		50.750.000,00		51.511.250,00		51.522.668,75		52.295.508,87		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		10	50.000.000,00	10	50.750.000,00	10	51.511.250,00	10	51.522.668,75	10	52.295.508,87		
1.05.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				5.000.000,00		5.075.000,00		5.151.125,00		5.152.267,88		5.229.550,88		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)		1	5.000.000,00	1	5.075.000,00	1	5.151.125,00	1	5.152.267,88	1	5.229.550,88		
1.05.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.000.000,00		10.150.000,00		103.022,50		10.304.533,75		10.459.101,76		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		1	10.000.000,00	1	10.150.000,00	1	103.022,50	1	10.304.533,75	1	10.459.101,76		
1.05.01.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				5.000.000,00		5.075.000,00		5.151.125,00		5.152.267,88		5.229.550,88		
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)		1	5.000.000,00	1	5.075.000,00	1	5.151.125,00	1	5.152.267,88	1	5.229.550,88		
1.05.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				20.000.000,00		20.292.500,00		51.170.469,00		20.593.827,27		20.902.746,70		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		1	20.000.000,00	1	20.292.500,00	1	51.170.469,00	1	20.593.827,27	1	20.902.746,70		
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				750.000.000,00		764.700.000,00		786.111.600,00		815.983.840,00		892.095.322,00		
Peningkatan Kasus Trantibum yang terselesaikan				750.000.000,00		764.700.000,00		786.111.600,00		815.983.840,00		892.095.322,00		
1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman,Keindahan) keindahan)			570.000.000,00		582.000.000,00		600.671.100,00		627.761.732,52		681.663.518,41		
1.05.02.2.01.0003 - Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				15.000.000,00		15.225.000,00		15.453.375,00		15.685.175,65		15.920.453,28		
Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)		1	15.000.000,00	1	15.225.000,00	1	15.453.375,00	1	15.685.175,65	1	15.920.453,28		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.02.2.01.0004 - Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum				80.000.000,00		81.200.000,00		46.906.750,00		47.610.351,25		48.324.506,52	1.05.0.00.0.00.06.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)		2	80.000.000,00	2	81.200.000,00	1	46.906.750,00	1	47.610.351,25	1	48.324.506,52		
1.05.02.2.01.0006 - Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum				20.000.000,00		20.300.000,00		20.604.500,00		20.913.567,50		21.227.271,01		
Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Dokumen)		1	20.000.000,00	1	20.300.000,00	1	20.604.500,00	1	20.913.567,50	1	21.227.271,01		
1.05.02.2.01.0008 - Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat				10.000.000,00		10.150.000,00		10.302.250,00		10.456.783,75		10.613.635,51		
Tersedianya Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan (Dokumen)		1	10.000.000,00	1	10.150.000,00	1	10.302.250,00	1	10.456.783,75	1	10.613.635,51		
1.05.02.2.01.0010 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional				30.000.000,00		33.900.000,00		79.860.850,00		99.139.328,75		122.475.404,66		
Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP bagi Polisi Pamong Praja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja (Orang)		1	30.000.000,00	1	33.900.000,00	2	79.860.850,00	2	99.139.328,75	3	122.475.404,66		
1.05.02.2.01.0011 - Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP				10.000.000,00		10.150.000,00		10.302.250,00		10.456.783,75		10.613.635,51		
Melakukan Penilaian terhadap kinerja Pejabat Fungsional	Jumlah Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Tim Penilai angka kredit jabatan fungsional Pol PP yang dibentuk melalui SK Kepala Daerah (Dokumen)		1	10.000.000,00	1	10.150.000,00	1	10.302.250,00	1	10.456.783,75	1	10.613.635,51		
1.05.02.2.01.0012 - Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan				10.000.000,00		10.150.000,00		10.302.250,00		10.456.783,75		10.613.635,51		
meningkatnya Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional Pol PP	Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan. (Orang)		1	10.000.000,00	1	10.150.000,00	1	10.302.250,00	1	10.456.783,75	1	10.613.635,51		
1.05.02.2.01.0013 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat				120.000.000,00		121.800.000,00		123.627.000,00		125.481.405,00		150.000.000,00		
Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)		100	120.000.000,00	100	121.800.000,00	100	123.627.000,00	100	125.481.405,00	100	150.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.02.2.01.0014 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas				50.000.000,00		50.750.000,00		51.511.250,00		52.283.918,75		53.068.177,53	1.05.0.00.0.00.06.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas (Orang)		10	50.000.000,00	10	50.750.000,00	10	51.511.250,00	10	52.283.918,75	10	53.068.177,53		
1.05.02.2.01.0015 - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan				110.000.000,00		111.650.000,00		113.324.750,00		115.024.621,24		116.749.990,56		
Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, PengamTerlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalananan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan (laporan)		12	110.000.000,00	12	111.650.000,00	12	113.324.750,00	12	115.024.621,24	12	116.749.990,56		
1.05.02.2.01.0016 - Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa				20.000.000,00		20.300.000,00		20.604.500,00		20.913.567,50		21.227.271,01		
Terlaksananya Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Laporan)		6	20.000.000,00	6	20.300.000,00	6	20.604.500,00	6	20.913.567,50	6	21.227.271,01		
1.05.02.2.01.0017 - Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah				5.000.000,00		5.075.000,00		5.151.125,00		5.228.391,88		5.306.817,75		
Tersedianya Pelayanan dasar kepada warga negara yang terkena Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayanijumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani (Laporan)		1	5.000.000,00	1	5.075.000,00	1	5.151.125,00	1	5.228.391,88	1	5.306.817,75		
1.05.02.2.01.0018 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum				50.000.000,00		50.750.000,00		51.511.250,00		52.283.918,75		53.068.177,53		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia (Unit)		2	50.000.000,00	2	50.750.000,00	2	51.511.250,00	2	52.283.918,75	2	53.068.177,53		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.02.2.01.0019 - Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota				10.000.000,00		10.150.000,00		10.302.250,00		10.456.783,75		10.613.635,51	1.05.0.00.0.00.06.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
Terbentuknya Satgas Linmas di tingkat Kab/Kota dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat melalui SK Bupati/Wali Kota	Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas (Dokumen)		1	10.000.000,00	1	10.150.000,00	1	10.302.250,00	1	10.456.783,75	1	10.613.635,51		
1.05.02.2.01.0025 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja				30.000.000,00		30.450.000,00		30.906.750,00		31.370.351,25		31.840.906,52		
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas (Orang)		2	30.000.000,00	2	30.450.000,00	2	30.906.750,00	2	31.370.351,25	2	31.840.906,52		
1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Terlaksananya Pemeliharaan Kantrantibmas			110.000.000,00		111.650.000,00		113.324.750,00		115.024.621,25		136.136.355,06		
1.05.02.2.02.0004 - Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				30.000.000,00		30.450.000,00		30.906.750,00		31.370.351,25		31.840.906,52		
Terlaksananya Pembinaan dan Penyuluhan pada Pelanggar Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (laporan)		1	30.000.000,00	1	30.450.000,00	1	30.906.750,00	1	31.370.351,25	1	31.840.906,52		
1.05.02.2.02.0005 - Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				10.000.000,00		10.150.000,00		10.302.250,00		10.456.783,75		10.613.635,51		
Tersusunnya SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (dokumen)		1	10.000.000,00	1	10.150.000,00	1	10.302.250,00	1	10.456.783,75	1	10.613.635,51		
1.05.02.2.02.0006 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)				10.000.000,00		10.150.000,00		10.302.250,00		10.456.783,75		30.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (unit)		1	10.000.000,00	1	10.150.000,00	1	10.302.250,00	1	10.456.783,75	2	30.000.000,00		
1.05.02.2.02.0007 - Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				10.000.000,00		10.150.000,00		10.302.250,00		10.456.783,75		10.613.635,51		
Terlaksananya Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)		1	10.000.000,00	1	10.150.000,00	1	10.302.250,00	1	10.456.783,75	1	10.613.635,51		
1.05.02.2.02.0008 - Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah				5.000.000,00		5.075.000,00		5.151.125,00		5.228.391,88		5.306.817,75		
Terlaksananya Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan (laporan)		1	5.000.000,00	1	5.075.000,00	1	5.151.125,00	1	5.228.391,88	1	5.306.817,75		
1.05.02.2.02.0009 - Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah				5.000.000,00		5.075.000,00		5.151.125,00		5.228.391,86		5.306.817,75		
Terlaksananya Pemberkasan Hasil Penyidikan oleh PPNS Penegak Perda	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda (Dokumen)		1	5.000.000,00	1	5.075.000,00	1	5.151.125,00	1	5.228.391,86	1	5.306.817,75		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.02.2.02.0010 - Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				30.000.000,00		30.450.000,00		30.906.750,00		31.370.351,25		31.840.906,52	1.05.0.00.0.00.06 0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)		1	30.000.000,00	1	30.450.000,00	1	30.906.750,00	1	31.370.351,25	1	31.840.906,52		
1.05.02.2.02.0011 - Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah				5.000.000,00		5.075.000,00		5.151.125,00		5.228.391,88		5.306.817,75		
Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP (Laporan)		1	5.000.000,00	1	5.075.000,00	1	5.151.125,00	1	5.228.391,88	1	5.306.817,75		
1.05.02.2.02.0012 - Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				5.000.000,00		5.075.000,00		5.151.125,00		5.228.391,88		5.306.817,75		
TTerlaksananya Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)		1	5.000.000,00	1	5.075.000,00	1	5.151.125,00	1	5.228.391,88	1	5.306.817,75		
1.05.02.2.03 - Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan PPNS			70.000.000,00		71.050.000,00		72.115.750,00		73.197.486,23		74.295.448,53		
1.05.02.2.03.0002 - Pembentukan Sekretariat PPNS				5.000.000,00		5.075.000,00		5.151.125,00		5.228.391,87		5.306.817,75		
Terbentuknya Sekretariat PPNS	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS (Dokumen)		1	5.000.000,00	1	5.075.000,00	1	5.151.125,00	1	5.228.391,87	1	5.306.817,75		
1.05.02.2.03.0003 - Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah				5.000.000,00		5.075.000,00		5.151.125,00		5.228.391,87		5.306.817,75		
Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah (Dokumen)		1	5.000.000,00	1	5.075.000,00	1	5.151.125,00	1	5.228.391,87	1	5.306.817,75		
1.05.02.2.03.0004 - Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah				5.000.000,00		5.075.000,00		5.151.125,00		5.228.391,87		5.306.817,75		
Tersediannya Anggaran Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah (Laporan)		1	5.000.000,00	1	5.075.000,00	1	5.151.125,00	1	5.228.391,87	1	5.306.817,75		
1.05.02.2.03.0005 - Dukungan Operasional Sekretariat PPNS				5.000.000,00		5.075.000,00		5.151.125,00		5.228.391,87		5.306.817,75		
Terlaksananya Tugas dan Fungsi Sekretariat PPNS dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS (Laporan)		1	5.000.000,00	1	5.075.000,00	1	5.151.125,00	1	5.228.391,87	1	5.306.817,75		
1.05.02.2.03.0006 - Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS				50.000.000,00		50.750.000,00		51.511.250,00		52.283.918,75		53.068.177,53		
Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda (Laporan)		1	50.000.000,00	1	50.750.000,00	1	51.511.250,00	1	52.283.918,75	1	53.068.177,53		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				500.000.000,00		509.800.000,00		524.074.400,00		543.989.227,00		559.220.925,00	1.05.0.00.0.00.06.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
Persentase Penanganan Aduan Kebakaran dan Penyelamatan Korban kebakaran				500.000.000,00		509.800.000,00		524.074.400,00		543.989.227,00		559.220.925,00		
1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran			385.000.000,00		392.075.000,00		405.598.507,00		425.487.098,93		438.941.254,82		
1.05.04.2.01.0001 - Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				75.000.000,00		76.125.000,00		77.266.857,00		78.425.868,13		79.602.266,30		
Tersedianya Dokumen NSPM yang Berkaitan Dengan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya (Dokumen)		10	75.000.000,00	10	76.125.000,00	10	77.266.857,00	10	78.425.868,13	10	79.602.266,30		
1.05.04.2.01.0002 - Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				75.000.000,00		75.125.000,00		77.266.875,00		77.284.003,13		78.443.263,17		
Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)		10	75.000.000,00	10	75.125.000,00	10	77.266.875,00	10	77.284.003,13	10	78.443.263,17		
1.05.04.2.01.0003 - Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran				20.000.000,00		20.300.000,00		20.604.500,00		20.609.067,50		20.918.203,51		
Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen)		1	20.000.000,00	1	20.300.000,00	1	20.604.500,00	1	20.609.067,50	1	20.918.203,51		
1.05.04.2.01.0004 - Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				5.000.000,00		5.075.000,00		5.151.125,00		5.152.266,88		5.229.550,88		
Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan yang Berkaitan dengan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)		1	5.000.000,00		5.075.000,00	1	5.151.125,00	1	5.152.266,88	1	5.229.550,88		
1.05.04.2.01.0005 - Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri				5.000.000,00		5.075.000,00		5.151.125,00		5.152.266,88		5.229.550,88		
Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal (Dokumen)		1	5.000.000,00	1	5.075.000,00	1	5.151.125,00	1	5.152.266,88	1	5.229.550,88		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.04.2.01.0007 - Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran				50.000.000,00		53.050.000,00		60.473.150,00		79.143.333,25		87.402.342,84	1.05.0.00.0.00.06 0000 - Satuan Polisi Pamong Raja	
Tersedianya Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Orang)		100	50.000.000,00	100	53.050.000,00	100	60.473.150,00	100	79.143.333,25	100	87.402.342,84		
1.05.04.2.01.0008 - Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)				5.000.000,00		5.075.000,00		5.151.125,00		5.152.266,88		5.229.550,88		
Tersedianya Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya (Desa/Kelurahan)		1	5.000.000,00	1	5.075.000,00	1	5.151.125,00	1	5.152.266,88	1	5.229.550,88		
1.05.04.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)				5.000.000,00		5.075.000,00		5.151.125,00		5.152.266,88		5.229.550,88		
Tersedianya Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (Dokumen)		1	5.000.000,00	1	5.075.000,00	1	5.151.125,00	1	5.152.266,88	1	5.229.550,88		
1.05.04.2.01.0012 - Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran				5.000.000,00		5.075.000,00		5.151.125,00		5.152.266,88		5.229.550,88		
Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran Terlaksananya kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran	Jumlah laporan hasil kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran (laporan)		1	5.000.000,00		5.075.000,00	1	5.151.125,00	1	5.152.266,88	1	5.229.550,88		
1.05.04.2.01.0013 - Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)				5.000.000,00		5.075.000,00		5.151.125,00		5.152.266,88		5.229.550,88		
Tersedianya Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (Dokumen)		1	5.000.000,00	1	5.075.000,00	1	5.151.125,00	1	5.152.266,88	1	5.229.550,88		
1.05.04.2.01.0014 - Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran				30.000.000,00		30.450.000,00		30.906.750,00		30.913.601,25		31.377.305,27		
Terlaksananya kegiatan jabatan fungsional analis kebakaran	Jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional analis kebakaran (Dokumen)		1	30.000.000,00	1	30.450.000,00	1	30.906.750,00	1	30.913.601,25	1	31.377.305,27		
1.05.04.2.01.0015 - Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan				5.000.000,00		5.075.000,00		5.151.125,00		5.152.266,88		5.229.550,88		
Tersedianya Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan penyelamatan yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Dokumen)		1	5.000.000,00	1	5.075.000,00	1	5.151.125,00	1	5.152.266,88	1	5.229.550,88		
1.05.04.2.01.0016 - Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran				5.000.000,00		5.075.000,00		5.151.125,00		5.152.266,88		5.229.550,88		
Terlaksananya kegiatan jabatan fungsional pemadam kebakaran	jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional pemadam kebakaran (Dokumen)		1	5.000.000,00	1	5.075.000,00	1	5.151.125,00	1	5.152.266,88	1	5.229.550,88		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.04.2.01.0017 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri				40.000.000,00		40.600.000,00		41.209.000,00		41.218.135,00		41.836.407,03	1.05.0.00.0.00.06 0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit)		2	40.000.000,00	2	40.600.000,00	2	41.209.000,00	2	41.218.135,00	2	41.836.407,03		
1.05.04.2.01.0018 - Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				5.000.000,00		5.075.000,00		5.151.125,00		5.152.266,88		5.229.550,88		
Tersedianya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen)		1	5.000.000,00	1	5.075.000,00	1	5.151.125,00	1	5.152.266,88	1	5.229.550,88		
1.05.04.2.01.0019 - Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga				50.000.000,00		50.750.000,00		51.511.250,00		51.522.688,75		52.295.508,78		
Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga (Keluarga)		50	50.000.000,00		50.750.000,00	50	51.511.250,00	50	51.522.688,75	50	52.295.508,78		
1.05.04.2.02 - Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Terlaksananya pendataan sarana dan prasarana			10.000.000,00		10.150.000,00		10.302.250,00		10.304.533,76		10.459.101,76		
1.05.04.2.02.0001 - Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran				5.000.000,00		5.075.000,00		5.151.125,00		5.152.266,88		5.229.550,88		
Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memiliki Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran (Dokumen)		1	5.000.000,00	1	5.075.000,00	1	5.151.125,00	1	5.152.266,88	1	5.229.550,88		
1.05.04.2.02.0002 - Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran				5.000.000,00		5.075.000,00		5.151.125,00		5.152.266,88		5.229.550,88		
Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Bangunan Gedung Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran (Dokumen)		1	5.000.000,00	1	5.075.000,00	1	5.151.125,00	1	5.152.266,88	1	5.229.550,88		
1.05.04.2.03 - Investigasi Kejadian Kebakaran	Terlaksananya investigasi kejadian kebakaran			5.000.000,00		5.075.000,00		5.151.125,00		5.152.266,88		5.229.550,88		
	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian (Dokumen)		1	5.000.000,00	1	5.075.000,00	1	5.151.125,00	1	5.152.266,88	1	5.229.550,88		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.04.2.03.0001 - Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran				5.000.000,00		5.075.000,00		5.151.125,00		5.152.266,88		5.229.550,88	1.05.0.00.0.00.06.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian (Dokumen)		1	5.000.000,00	1	5.075.000,00	1	5.151.125,00	1	5.152.266,88	1	5.229.550,88		
1.05.04.2.04 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Tertaksananya Simulasi Cegah Dini Bahaya Bencana Kebakaran			55.000.000,00		55.825.000,00		56.662.375,00		56.674.935,64		57.525.059,66		
1.05.04.2.04.0001 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat				45.000.000,00		45.675.000,00		46.360.125,00		46.370.401,88		47.065.957,90		
Tertaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Setiap Tahunnya	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya (Orang)		20	45.000.000,00	20	45.675.000,00	20	46.360.125,00	20	46.370.401,88	20	47.065.957,90		
1.05.04.2.04.0002 - Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran				5.000.000,00		5.075.000,00		5.151.125,00		5.152.266,88		5.229.550,88		
Tersedianya Dokumen Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran di Desa dan Kelurahan Setiap Tahunnya	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya (Desa/Kelurahan)		1	5.000.000,00	1	5.075.000,00	1	5.151.125,00	1	5.152.266,88	1	5.229.550,88		
1.05.04.2.04.0003 - Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana				5.000.000,00		5.075.000,00		5.151.125,00		5.152.266,88		5.229.550,88		
Tersedianya Dokumen yang Memuat SKKL Pada Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sarana dan Prasarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar (Dokumen)		1	5.000.000,00	1	5.075.000,00	1	5.151.125,00	1	5.152.266,88	1	5.229.550,88		
1.05.04.2.05 - Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Tertaksananya operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia			45.000.000,00		46.675.000,00		46.360.143,00		46.370.391,79		47.065.957,88		
1.05.04.2.05.0001 - Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia				5.000.000,00		5.075.000,00		5.151.125,00		5.152.266,88		5.229.550,88		
Tersedianya Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia (Laporan)		1	5.000.000,00	1	5.075.000,00	1	5.151.125,00	1	5.152.266,88	1	5.229.550,88		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.04.2.05.0002 - Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi				5.000.000,00		5.075.000,00		5.151.125,00		5.152.266,88		5.229.550,88	1.05.0.00.0.00.06 0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
Tersedianya Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar Secara Berkala, Sah, dan Legal	Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar (Dokumen)		1	5.000.000,00	1	5.075.000,00	1	5.151.125,00	1	5.152.266,88	1	5.229.550,88		
1.05.04.2.05.0004 - Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi				10.000.000,00		10.150.000,00		10.302.250,00		10.304.533,75		10.459.101,76		
Terlaksananya Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal (Laporan)		1	10.000.000,00	1	10.150.000,00	1	10.302.250,00	1	10.304.533,75	1	10.459.101,76		
1.05.04.2.05.0005 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi				25.000.000,00		26.375.000,00		25.755.643,00		25.761.324,28		26.147.754,36		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis (Unit)		2	25.000.000,00	2	26.375.000,00	2	25.755.643,00	2	25.761.324,28	2	26.147.754,36		

4.4 Uraian Sub Kegiatan Dalam Mendukung Program Pembangunan Daerah

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan dan Pendanaan dalam mendukung Program Pembangunan Daerah pada pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende dalam kurun waktu lima (5) adalah sebagai berikut:

(1) Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum, dengan kegiatan:

1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan :

- a. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan.
- b. Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
- c. Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
- d. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
- e. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
- f. Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- g. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum
- h. Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
- i. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional
- j. Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP
- k. Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan
- l. Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah
- m. Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota

2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Sub Kegiatan :

- a. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota

- b. Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
 - c. Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - d. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)
 - e. Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - f. Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah
 - g. Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah
 - h. Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
3. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten / Kota Sub Kegiatan :
- a. Pembentukan Sekretariat PPNS
 - b. Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah
 - c. Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah
 - d. Dukungan Operasional Sekretariat PPNS
 - e. Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS
- (2) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran dengan Kegiatan
- 1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan :
 - a. Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - c. Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
 - d. Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - e. Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
 - f. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
 - g. Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran
 - h. Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)

- i. Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)
- j. Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)
- k. Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)
- l. Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran
- m. Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
- n. Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga
- 2. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran dengan Sub Kegiatan :
 - a. Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
 - b. Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
- 3. Investigasi Kejadian Kebakaran dengan Sub Kegiatan :
Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran
- 4. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia dengan Sub Kegiatan :
 - a. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia
 - b. Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi
 - c. Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana
 - d. Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi
- 5. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran dengan Sub Kegiatan :
 - a. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
 - b. Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran
 - c. Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana
 - d. Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan dan Pendanaan dalam mendukung Program Pembangunan Daerah pada Satu Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende dalam kurun waktu lima (5) tahun (2026-2030) seperti terlihat pada table di bawah ini:

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
DALAM MENDUKUNG PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				1.250.000.000		1.274.500.000		1.310.186.000		1.359.973.067		1.451.316.247		
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				750.000.000,00		764.700.000,00		786.111.600,00		815.983.840,00		892.095.322,00		
Peningkatan Kasus Trantibum yang Terselesaikan				750.000.000,00		764.700.000,00		786.111.600,00		815.983.840,00		892.095.322,00		
1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman,Keindahan) keindahan)			570.000.000,00		582.000.000,00		600.671.100,00		627.761.732,52		681.663.518,41		
1.05.02.2.01.0003 - Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				15.000.000,00		15.225.000,00		15.453.375,00		15.685.175,65		15.920.453,28		
Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)		1	15.000.000,00	1	15.225.000,00	1	15.453.375,00	1	15.685.175,65	1	15.920.453,28		
1.05.02.2.01.0004 - Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum				80.000.000,00		81.200.000,00		46.906.750,00		47.610.351,25		48.324.506,52	1.05.0.00.0.00.06.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)		2	80.000.000,00	2	81.200.000,00	1	46.906.750,00	1	47.610.351,25	1	48.324.506,52		
1.05.02.2.01.0006 - Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum				20.000.000,00		20.300.000,00		20.604.500,00		20.913.567,50		21.227.271,01		
Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Dokumen)		1	20.000.000,00	1	20.300.000,00	1	20.604.500,00	1	20.913.567,50	1	21.227.271,01		
1.05.02.2.01.0008 - Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat				10.000.000,00		10.150.000,00		10.302.250,00		10.456.783,75		10.613.635,51		
Tersedianya Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan (Dokumen)		1	10.000.000,00	1	10.150.000,00	1	10.302.250,00	1	10.456.783,75	1	10.613.635,51		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.02.2.01.0010 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional				30.000.000,00		33.900.000,00		79.860.850,00		99.139.328,75		122.475.404,66		
Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP bagi Polisi Pamong Praja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja (Orang)		1	30.000.000,00	1	33.900.000,00	2	79.860.850,00	2	99.139.328,75	3	122.475.404,66		
1.05.02.2.01.0011 - Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP				10.000.000,00		10.150.000,00		10.302.250,00		10.456.783,75		10.613.635,51		
Melakukan Penilaian terhadap kinerja Pejabat Fungsional	Jumlah Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Tim Penilai angka kredit jabatan fungsional Pol PP yang dibentuk melalui SK Kepala Daerah (Dokumen)		1	10.000.000,00	1	10.150.000,00	1	10.302.250,00	1	10.456.783,75	1	10.613.635,51		
1.05.02.2.01.0012 - Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan				10.000.000,00		10.150.000,00		10.302.250,00		10.456.783,75		10.613.635,51		
meningkatnya Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional Pol PP	Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan. (Orang)		1	10.000.000,00	1	10.150.000,00	1	10.302.250,00	1	10.456.783,75	1	10.613.635,51		
1.05.02.2.01.0013 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat				120.000.000,00		121.800.000,00		123.627.000,00		125.481.405,00		150.000.000,00		
Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)		100	120.000.000,00	100	121.800.000,00	100	123.627.000,00	100	125.481.405,00	100	150.000.000,00		
1.05.02.2.01.0014 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas				50.000.000,00		50.750.000,00		51.511.250,00		52.283.918,75		53.068.177,53	1.05.0.00.0.00.06.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas (Orang)		10	50.000.000,00	10	50.750.000,00	10	51.511.250,00	10	52.283.918,75	10	53.068.177,53		
1.05.02.2.01.0015 - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan				110.000.000,00		111.650.000,00		113.324.750,00		115.024.621,24		116.749.990,56		
Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, PengamTerlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan (laporan)		12	110.000.000,00	12	111.650.000,00	12	113.324.750,00	12	115.024.621,24	12	116.749.990,56		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.02.2.01.0016 - Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa				20.000.000,00		20.300.000,00		20.604.500,00		20.913.567,50		21.227.271,01		
Terlaksananya Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Laporan)		6	20.000.000,00	6	20.300.000,00	6	20.604.500,00	6	20.913.567,50	6	21.227.271,01		
1.05.02.2.01.0017 - Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah				5.000.000,00		5.075.000,00		5.151.125,00		5.228.391,88		5.306.817,75		
Tersedianya Pelayanan dasar kepada warga negara yang terkena Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayanijumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani (Laporan)		1	5.000.000,00	1	5.075.000,00	1	5.151.125,00	1	5.228.391,88	1	5.306.817,75		
1.05.02.2.01.0018 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum				50.000.000,00		50.750.000,00		51.511.250,00		52.283.918,75		53.068.177,53		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia (Unit)		2	50.000.000,00	2	50.750.000,00	2	51.511.250,00	2	52.283.918,75	2	53.068.177,53		
1.05.02.2.01.0019 - Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota				10.000.000,00		10.150.000,00		10.302.250,00		10.456.783,75		10.613.635,51	1.05.0.00.0.00.06.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
Terbentuknya Satgas Linmas di tingkat Kab/Kota dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat melalui SK Bupati/Wali Kota	Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas (Dokumen)		1	10.000.000,00	1	10.150.000,00	1	10.302.250,00	1	10.456.783,75	1	10.613.635,51		
1.05.02.2.01.0025 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja				30.000.000,00		30.450.000,00		30.906.750,00		31.370.351,25		31.840.906,52		
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas (Orang)		2	30.000.000,00	2	30.450.000,00	2	30.906.750,00	2	31.370.351,25	2	31.840.906,52		
1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Terlaksananya Pemeliharaan Kantrantibmas			110.000.000,00		111.650.000,00		113.324.750,00		115.024.621,25		136.136.355,06		
1.05.02.2.02.0004 - Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				30.000.000,00		30.450.000,00		30.906.750,00		31.370.351,25		31.840.906,52		
Terlaksananya Pembinaan dan Penyuluhan pada Pelanggar Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (laporan)		1	30.000.000,00	1	30.450.000,00	1	30.906.750,00	1	31.370.351,25	1	31.840.906,52		
1.05.02.2.02.0005 - Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				10.000.000,00		10.150.000,00		10.302.250,00		10.456.783,75		10.613.635,51		
Tersusunnya SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (dokumen)		1	10.000.000,00	1	10.150.000,00	1	10.302.250,00	1	10.456.783,75	1	10.613.635,51		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.02.2.02.0006 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)				10.000.000,00		10.150.000,00		10.302.250,00		10.456.783,75		30.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (unit)		1	10.000.000,00	1	10.150.000,00	1	10.302.250,00	1	10.456.783,75	2	30.000.000,00		
1.05.02.2.02.0007 - Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				10.000.000,00		10.150.000,00		10.302.250,00		10.456.783,75		10.613.635,51		
Terlaksananya Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)		1	10.000.000,00	1	10.150.000,00	1	10.302.250,00	1	10.456.783,75	1	10.613.635,51		
1.05.02.2.02.0008 - Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah				5.000.000,00		5.075.000,00		5.151.125,00		5.228.391,88		5.306.817,75		
Terlaksananya Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan (laporan)		1	5.000.000,00	1	5.075.000,00	1	5.151.125,00	1	5.228.391,88	1	5.306.817,75		
1.05.02.2.02.0009 - Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah				5.000.000,00		5.075.000,00		5.151.125,00		5.228.391,88		5.306.817,75		
Terlaksananya Pemberkasan Hasil Penyidikan oleh PPNS Penegak Perda	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda (Dokumen)		1	5.000.000,00	1	5.075.000,00	1	5.151.125,00	1	5.228.391,88	1	5.306.817,75	1.05.0.00.0.00.06.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.02.2.02.0010 - Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				30.000.000,00		30.450.000,00		30.906.750,00		31.370.351,25		31.840.906,52		
Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)		1	30.000.000,00	1	30.450.000,00	1	30.906.750,00	1	31.370.351,25	1	31.840.906,52		
1.05.02.2.02.0011 - Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah				5.000.000,00		5.075.000,00		5.151.125,00		5.228.391,88		5.306.817,75		
Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP (Laporan)		1	5.000.000,00	1	5.075.000,00	1	5.151.125,00	1	5.228.391,88	1	5.306.817,75		
1.05.02.2.02.0012 - Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				5.000.000,00		5.075.000,00		5.151.125,00		5.228.391,88		5.306.817,75		
TTerlaksananya Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)		1	5.000.000,00	1	5.075.000,00	1	5.151.125,00	1	5.228.391,88	1	5.306.817,75		
1.05.02.2.03 - Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan PPNS			70.000.000,00		71.050.000,00		72.115.750,00		73.197.486,23		74.295.448,53		
1.05.02.2.03.0002 - Pembentukan Sekretariat PPNS				5.000.000,00		5.075.000,00		5.151.125,00		5.228.391,87		5.306.817,75		
Terbentuknya Sekretariat PPNS	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS (Dokumen)		1	5.000.000,00	1	5.075.000,00	1	5.151.125,00	1	5.228.391,87	1	5.306.817,75		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.02.2.03.0003 - Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah				5.000.000,00		5.075.000,00		5.151.125,00		5.228.391,87		5.306.817,75		
Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah (Dokumen)		1	5.000.000,00	1	5.075.000,00	1	5.151.125,00	1	5.228.391,87	1	5.306.817,75		
1.05.02.2.03.0004 - Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah				5.000.000,00		5.075.000,00		5.151.125,00		5.228.391,87		5.306.817,75		
Tersediannya Anggaran Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah (Laporan)		1	5.000.000,00	1	5.075.000,00	1	5.151.125,00	1	5.228.391,87	1	5.306.817,75		
1.05.02.2.03.0005 - Dukungan Operasional Sekretariat PPNS				5.000.000,00		5.075.000,00		5.151.125,00		5.228.391,87		5.306.817,75		
Terlaksananya Tugas dan Fungsi Sekretariat PPNS dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS (Laporan)		1	5.000.000,00	1	5.075.000,00	1	5.151.125,00	1	5.228.391,87	1	5.306.817,75		
1.05.02.2.03.0006 - Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS				50.000.000,00		50.750.000,00		51.511.250,00		52.283.918,75		53.068.177,53		
Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda (Laporan)		1	50.000.000,00	1	50.750.000,00	1	51.511.250,00	1	52.283.918,75	1	53.068.177,53		
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				500.000.000,00		509.800.000,00		524.074.400,00		543.989.227,00		559.220.925,00	1.05.0.00.0.00.06.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
Persentase Penanganan Aduan Kebakaran dan Penyelamatan Korban kebakaran				500.000.000,00		509.800.000,00		524.074.400,00		543.989.227,00		559.220.925,00		
1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran			385.000.000,00		392.075.000,00		405.598.507,00		425.487.098,93		438.941.254,82		
1.05.04.2.01.0001 - Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				75.000.000,00		76.125.000,00		77.266.857,00		78.425.868,13		79.602.266,30		
Tersedianya Dokumen NSPM yang Berkaitan Dengan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya (Dokumen)		10	75.000.000,00	10	76.125.000,00	10	77.266.857,00	10	78.425.868,13	10	79.602.266,30		
1.05.04.2.01.0002 - Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				75.000.000,00		75.125.000,00		77.266.875,00		77.284.003,13		78.443.263,17		
Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)		10	75.000.000,00	10	75.125.000,00	10	77.266.875,00	10	77.284.003,13	10	78.443.263,17		
1.05.04.2.01.0003 - Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran				20.000.000,00		20.300.000,00		20.604.500,00		20.609.067,50		20.918.203,51		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN				
			2026		2027		2028		2029		2030							
			TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU						
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)				
Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen)		1	20.000.000,00	1	20.300.000,00	1	20.604.500,00	1	20.609.067,50	1	20.918.203,51						
1.05.04.2.01.0004 - Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				5.000.000,00		5.075.000,00		5.151.125,00		5.152.266,88		5.229.550,88						
Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan yang Berkaitan dengan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)		1	5.000.000,00		5.075.000,00	1	5.151.125,00	1	5.152.266,88	1	5.229.550,88						
1.05.04.2.01.0005 - Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri				5.000.000,00		5.075.000,00		5.151.125,00		5.152.266,88		5.229.550,88						
Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal (Dokumen)		1	5.000.000,00	1	5.075.000,00	1	5.151.125,00	1	5.152.266,88	1	5.229.550,88						
1.05.04.2.01.0007 - Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran				50.000.000,00		53.050.000,00		60.473.150,00		79.143.333,25		87.402.342,84			1.05.0.00.0.00.06.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja			
Tersedianya Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Orang)		100	50.000.000,00	100	53.050.000,00	100	60.473.150,00	100	79.143.333,25	100	87.402.342,84						
1.05.04.2.01.0008 - Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)				5.000.000,00		5.075.000,00		5.151.125,00		5.152.266,88		5.229.550,88						
Tersedianya Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya (Desa/Kelurahan)		1	5.000.000,00	1	5.075.000,00	1	5.151.125,00	1	5.152.266,88	1	5.229.550,88						
1.05.04.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)				5.000.000,00		5.075.000,00		5.151.125,00		5.152.266,88		5.229.550,88						
Tersedianya Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (Dokumen)		1	5.000.000,00	1	5.075.000,00	1	5.151.125,00	1	5.152.266,88	1	5.229.550,88						
1.05.04.2.01.0012 - Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran				5.000.000,00		5.075.000,00		5.151.125,00		5.152.266,88		5.229.550,88						
Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran Terlaksananya kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran	Jumlah laporan hasil kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran (laporan)		1	5.000.000,00		5.075.000,00	1	5.151.125,00	1	5.152.266,88	1	5.229.550,88						

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.04.2.01.0013 - Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)				5.000.000,00		5.075.000,00		5.151.125,00		5.152.266,88		5.229.550,88		
Tersedianya Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (Dokumen)		1	5.000.000,00	1	5.075.000,00	1	5.151.125,00	1	5.152.266,88	1	5.229.550,88		
1.05.04.2.01.0014 - Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran				30.000.000,00		30.450.000,00		30.906.750,00		30.913.601,25		31.377.305,27		
Terlaksananya kegiatan jabatan fungsional analis kebakaran	Jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional analis kebakaran (Dokumen)		1	30.000.000,00	1	30.450.000,00	1	30.906.750,00	1	30.913.601,25	1	31.377.305,27		
1.05.04.2.01.0015 - Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan				5.000.000,00		5.075.000,00		5.151.125,00		5.152.266,88		5.229.550,88		
Tersedianya Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan penyelamatan yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Dokumen)		1	5.000.000,00	1	5.075.000,00	1	5.151.125,00	1	5.152.266,88	1	5.229.550,88		
1.05.04.2.01.0016 - Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran				5.000.000,00		5.075.000,00		5.151.125,00		5.152.266,88		5.229.550,88		
Terlaksananya kegiatan jabatan fungsional pemadam kebakaran	jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional pemadam kebakaran (Dokumen)		1	5.000.000,00	1	5.075.000,00	1	5.151.125,00	1	5.152.266,88	1	5.229.550,88		
1.05.04.2.01.0017 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri				40.000.000,00		40.600.000,00		41.209.000,00		41.218.135,00		41.836.407,03	1.05.0.00.0.00.06.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit)		2	40.000.000,00	2	40.600.000,00	2	41.209.000,00	2	41.218.135,00	2	41.836.407,03		
1.05.04.2.01.0018 - Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				5.000.000,00		5.075.000,00		5.151.125,00		5.152.266,88		5.229.550,88		
Tersedianya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen)		1	5.000.000,00	1	5.075.000,00	1	5.151.125,00	1	5.152.266,88	1	5.229.550,88		
1.05.04.2.01.0019 - Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga				50.000.000,00		50.750.000,00		51.511.250,00		51.522.688,75		52.295.508,78		
Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga (Keluarga)		50	50.000.000,00		50.750.000,00	50	51.511.250,00	50	51.522.688,75	50	52.295.508,78		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.04.2.02 - Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Tertersedianya pendataan sarana dan prasarana			10.000.000,00		10.150.000,00		10.302.250,00		10.304.533,76		10.459.101,76		
1.05.04.2.02.0001 - Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran				5.000.000,00		5.075.000,00		5.151.125,00		5.152.266,88		5.229.550,88		
Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memiliki Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran (Dokumen)		1	5.000.000,00	1	5.075.000,00	1	5.151.125,00	1	5.152.266,88	1	5.229.550,88		
1.05.04.2.02.0002 - Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran				5.000.000,00		5.075.000,00		5.151.125,00		5.152.266,88		5.229.550,88		
Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Bangunan Gedung Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran (Dokumen)		1	5.000.000,00	1	5.075.000,00	1	5.151.125,00	1	5.152.266,88	1	5.229.550,88		
1.05.04.2.03 - Investigasi Kejadian Kebakaran	Tertersedianya investigasi kejadian kebakaran			5.000.000,00		5.075.000,00		5.151.125,00		5.152.266,88		5.229.550,88		
	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian (Dokumen)		1	5.000.000,00	1	5.075.000,00	1	5.151.125,00	1	5.152.266,88	1	5.229.550,88		
1.05.04.2.03.0001 - Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran				5.000.000,00		5.075.000,00		5.151.125,00		5.152.266,88		5.229.550,88	1.05.0.00.0.00.06.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian (Dokumen)		1	5.000.000,00	1	5.075.000,00	1	5.151.125,00	1	5.152.266,88	1	5.229.550,88		
1.05.04.2.04 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Tertersedianya Simulasi Cegah Dini Bahaya Bencana Kebakaran			55.000.000,00		55.825.000,00		56.662.375,00		56.674.935,64		57.525.059,66		
1.05.04.2.04.0001 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat				45.000.000,00		45.675.000,00		46.360.125,00		46.370.401,88		47.065.957,90		
Tertersedianya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Setiap Tahunnya	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya (Orang)		20	45.000.000,00	20	45.675.000,00	20	46.360.125,00	20	46.370.401,88	20	47.065.957,90		
1.05.04.2.04.0002 - Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran				5.000.000,00		5.075.000,00		5.151.125,00		5.152.266,88		5.229.550,88		
Tersedianya Dokumen Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran di Desa dan Kelurahan Setiap Tahunnya	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya (Desa/Kelurahan)		1	5.000.000,00	1	5.075.000,00	1	5.151.125,00	1	5.152.266,88	1	5.229.550,88		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.04.2.04.0003 - Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana				5 000 000,00		5 075 000,00		5 151.125,00		5.152.266,88		5.229.550,88		
Tersedianya Dokumen yang Memuat SKKL Pada Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sarana dan Prasarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar (Dokumen)		1	5 000 000,00	1	5 075 000,00	1	5 151.125,00	1	5.152.266,88	1	5.229.550,88		
1.05.04.2.05 - Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Terlaksananya operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia			45 000 000,00		46.675 000,00		46.360.143,00		46.370.391,79		47.065.957,88		
1.05.04.2.05.0001 - Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia				5 000 000,00		5 075 000,00		5 151.125,00		5.152.266,88		5.229.550,88		
Tersedianya Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia (Laporan)		1	5 000 000,00	1	5 075 000,00	1	5 151.125,00	1	5.152.266,88	1	5.229.550,88		
1.05.04.2.05.0002 - Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi				5 000 000,00		5 075 000,00		5 151.125,00		5.152.266,88		5.229.550,88	1.05.0.00.0.00.06.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
Tersedianya Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar Secara Berkala, Sah, dan Legal	Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar (Dokumen)		1	5 000 000,00	1	5.075 000,00	1	5 151.125,00	1	5.152.266,88	1	5.229.550,88		
1.05.04.2.05.0004 - Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi				10 000 000,00		10.150 000,00		10.302.250,00		10.304.533,75		10.459.101,76		
Terlaksananya Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal (Laporan)		1	10 000 000,00	1	10.150 000,00	1	10.302.250,00	1	10.304.533,75	1	10.459.101,76		
1.05.04.2.05.0005 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi				25 000 000,00		26.375 000,00		25.755.643,00		25.761.324,28		26.147.754,36		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis (Unit)		2	25 000 000,00	2	26.375 000,00	2	25.755.643,00	2	25.761.324,28	2	26.147.754,36		

4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

Capaian kinerja Renstra setiap tahun diukur dari demensi akuntabilitas dengan menggunakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP). Sistem Renstra dengan LKj-IP -nya dikelola dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Sistem AKIP terdiri atas: Subsistem perencanaan, subsistem pengukuran kinerja dan subsistem pelaporan kinerja. Dalam modul Pengukuran dan Analisis Kinerja disebutkan : Pengukuran kinerja merupakan subsistem kedua dari Sistem AKIP, yaitu setelah subsistem perencanaan kinerja. (Meneg PAN, 2008: 2).

Indikator Kinerja dapat diartikan sebagai suatu ukuran kualitatif/kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu tujuan, sasaran serta program dan kegiatan dalam lima (5) tahun periode Renstra. Pemilihan Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende merupakan Indikator Kinerja yang menggunakan misi, tujuan dan sasaran sebagai barometer pengukuran terwujudnya keberhasilan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende sampai dengan tahun 2029 yang diseleraskan dengan RPJMD Kabupaten Ende (2025-2029). Indikator kinerja yang diterapkan pada Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Ende termasuk Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende, harus mencerminkan Indikator Kinerja Program (*Outcome*) dan Indikator Kegiatan (*Output*), sehingga ketersediaan dana (*input*) yang teranggarkan dalam kelembagaan akan bisa terlihat jelas sejauh mana keberhasilan dalam melaksanakan kegiatan kelembagaan secara internal, terfokus pada penyerapan anggaran serta sejauh mana keberhasilan kelembagaan dalam melaksanakan kegiatannya memiliki nilai manfaat (*benefit*) dan berdampak langsung (*impact*) kepada masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende telah menetapkan tiga (3) Indikator Kinerja Utama, sebagai berikut:

1. Persentase Pelanggaran Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang tertangani
2. Persentase Penegakan Perda dan Perkada yang ditegakkan
3. Persentase Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran Sesuai Standar

Tabel 7.

Tabel Indikator Kinerja TC28)

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Persentase Pelanggaran Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang tertangani	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2.	Persentase Penegakan Perda dan Perkada yang ditegakkan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3.	Persentase Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran Sesuai Standar	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Capaian kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) Hasil / out come
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende telah menetapkan tiga (3) Indikator Kinerja Utama, sebagai berikut:

- 1. Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan
- 2. Persentase Penegakan Perda dan Perkada yang ditegakkan
- 3. Persentase Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran Sesuai Standar

Tabel

Tabel INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL / OUTCOME

NO	INDIKATOR	RUMUS	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
E	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang ditangani}}{\text{Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk}} \times 100\%$	%	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	$\frac{\text{Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan}}{\text{Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi}} \times 100\%$	%	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran Sesuai Standar	$\frac{\text{Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kabupaten kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan atau Perangkat Daerah + jumlah layanan pemadaman di kab kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah}}{\text{Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota}} \times 100\%$	%	100	100	100	100	100	100	

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 merupakan dokumen perencanaan sebagai panduan bagi seluruh sub unit kerja di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dan memberikan gambaran utama tentang kinerja pelayanan beserta indikatornya yang telah diselaraskan dengan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan strategi organisasi dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2025 – 2029 sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Dengan adanya RENSTRA ini diharapkan dapat lebih mengefektifkan dan mengefisiensikan capaian tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende dimulai dari perencanaan, pengukuran kinerja, evaluasi dan sampai pada Laporan Kinerja.

Keberhasilan perwujudan RENSTRA sangat dipengaruhi oleh keterlibatan semua pihak, komitmen dengan bersinergi sehingga dapat diimplementasikan dengan baik selama kurun lima (5) tahun kedepan dan bernilai manfaat (*benefit value*) bagi masyarakat Kabupaten Ende secara nyata.


BUPATI ENDE,
YOSEF BENEDIKTUS BADEODA

Paraf Koordinasi	
Kepala Satpol PP	
Kepala Bagian Hukum	

Paraf Hirarki	
Plt. Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
Kepala Satpol PP	